



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disingkat SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

- (1) SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
 - a. SBK Umum; dan
 - b. SBK Khusus.
- (2) SBK Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan SBK yang berlaku untuk beberapa/seluruh kementerian/lembaga yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. SBK perencanaan dan penganggaran;
 - b. SBK laporan kinerja;
 - c. SBK pendidikan dan pelatihan;
 - d. SBK audit kinerja;
 - e. SBK rancangan standar nasional Indonesia 3 (tiga);
 - f. SBK pemantauan dan evaluasi;
 - g. SBK riset dan inovasi;
 - h. SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga;
 - i. SBK Peraturan Presiden;
 - j. SBK Peraturan Pemerintah;
 - k. SBK rancangan Undang-Undang;
 - l. SBK sosialisasi;
 - m. SBK kehumasan dan informasi;
 - n. SBK layanan barang milik negara;
 - o. SBK layanan bantuan hukum; dan
 - p. SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
- (3) SBK Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan SBK yang berlaku untuk 1 (satu) kementerian/lembaga tertentu.

Pasal 3

- (1) SBK Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SBK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga menggunakan SBK dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penggunaan SBK bersifat batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Dalam hal kementerian/lembaga membutuhkan besaran biaya yang melampaui besaran SBK yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
- (4) Pelampauan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disetujui dengan mempertimbangkan:
 - a. harga pasar;
 - b. prinsip ekonomis, efisien, dan efektif; dan/ atau
 - c. perubahan tahapan.
- (5) Pelampauan besaran yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dengan melakukan Revisi Anggaran.
- (6) Pengawasan atas penggunaan SBK sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penerapan SBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Standar Biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 856

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 113 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

SBK UMUM

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Standar Biaya Keluaran Perencanaan dan Penganggaran			
	a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker:			
	1) 20 s.d 40 satker	1 Dokumen	332.500.000,00	
	2) di atas 40 satker	1 Dokumen	810.400.000,00	
	b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dengan jumlah unit:			
	1) 1 s.d 6 unit	1 Dokumen	9.000.000,00	
	2) di atas 6 unit	1 Dokumen	135.000.000,00	
2	Standar Biaya Keluaran Laporan Kinerja (LAKIN)			
	a. Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker:			
	1) 20 s.d 40 satker	1 Dokumen	551.000.000,00	
	2) di atas 40 satker	1 Dokumen	808.300.000,00	
	b. Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dengan jumlah unit:			
	1) 1 s.d 6 unit	1 Dokumen	6.000.000,00	
	2) di atas 6 unit	1 Dokumen	130.500.000,00	
3	Standar Biaya Keluaran Pendidikan dan Pelatihan			
	a. Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan			
	1) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama	1 Orang	30.241.000,00	
	2) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pratama (<i>blended learning</i>)	1 Orang	22.945.000,00	
	3) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator	1 Orang	22.125.000,00	
	4) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator (<i>blended learning</i>)	1 Orang	17.000.000,00	
	5) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai	1 Orang	20.230.000,00	
	6) Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai (<i>blended learning</i>)	1 Orang	14.243.000,00	
	b. Layanan Pelatihan Dasar/Pengabdian			
	1) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	1 Orang	9.296.000,00	
	2) Layanan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (<i>blended learning</i>)	1 Orang	5.260.000,00	
	3) Layanan Pelatihan Penjabatan Kategori 1 dan Kategori 2	1 Orang	2.242.000,00	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
4	Standar Biaya Khusaran Audit Kinerja			
	a. Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama			
11	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Aceh	1 LHA	27.300.000,00	
21	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	25.800.000,00	
31	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Riau	1 LHA	25.500.000,00	
41	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	24.900.000,00	
51	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jambi	1 LHA	21.200.000,00	
61	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	24.200.000,00	
71	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	23.700.000,00	
81	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Lampung	1 LHA	17.700.000,00	
91	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bengkulu	1 LHA	22.000.000,00	
101	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	21.300.000,00	
111	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Banten	1 LHA	15.300.000,00	
121	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	14.100.000,00	
131	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	2.700.000,00	
141	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	19.600.000,00	
151	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	24.000.000,00	
161	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	23.900.000,00	
171	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Bali	1 LHA	28.500.000,00	
181	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	25.400.000,00	
191	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	29.800.000,00	
201	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	22.400.000,00	
211	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	23.700.000,00	
221	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	23.100.000,00	
231	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	30.300.000,00	
241	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	28.200.000,00	
251	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	31.400.000,00	
261	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Gorontalo	1 LHA	31.600.000,00	
271	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	31.500.000,00	
281	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	27.300.000,00	
291	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	33.100.000,00	
301	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	29.000.000,00	
311	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku	1 LHA	37.100.000,00	
321	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	34.600.000,00	
331	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua	1 LHA	45.400.000,00	
341	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat	1 LHA	48.500.000,00	
351	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Barat Daya	1 LHA	48.500.000,00	
361	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Tengah	1 LHA	45.400.000,00	
371	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Selatan	1 LHA	45.400.000,00	
381	Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama di Provinsi Papua Pegunungan	1 LHA	45.400.000,00	
	b. Layanan Audit Kinerja Dalam Kota			
11	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Aceh	1 LHA	58.300.000,00	
21	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	56.800.000,00	
31	Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Riau	1 LHA	56.500.000,00	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	4) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	55.800.000,00	
	5) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jambi	1 LHA	52.200.000,00	
	6) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	55.200.000,00	
	7) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	51.700.000,00	
	8) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Lampung	1 LHA	48.700.000,00	
	9) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bengkulu	1 LHA	53.000.000,00	
	10) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	52.200.000,00	
	11) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Banten	1 LHA	46.200.000,00	
	12) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Barat	1 LHA	45.300.000,00	
	13) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.K.I. Jakarta	1 LHA	36.200.000,00	
	14) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	50.600.000,00	
	15) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	1 LHA	54.900.000,00	
	16) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Jawa Timur	1 LHA	54.900.000,00	
	17) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Bali	1 LHA	59.500.000,00	
	18) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	56.300.000,00	
	19) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	60.800.000,00	
	20) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	53.300.000,00	
	21) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	54.600.000,00	
	22) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	54.100.000,00	
	23) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	61.300.000,00	
	24) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	59.200.000,00	
	25) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	62.400.000,00	
	26) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Gorontalo	1 LHA	62.800.000,00	
	27) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	62.500.000,00	
	28) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	58.300.000,00	
	29) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	64.100.000,00	
	30) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	60.600.000,00	
	31) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku	1 LHA	68.000.000,00	
	32) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Maluku Utara	1 LHA	65.500.000,00	
	33) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua	1 LHA	76.400.000,00	
	34) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Barat	1 LHA	79.500.000,00	
	35) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Barat Daya	1 LHA	79.500.000,00	
	36) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Tengah	1 LHA	76.400.000,00	
	37) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Selatan	1 LHA	76.400.000,00	
	38) Layanan Audit Kinerja Dalam Kota di Provinsi Papua Pegunungan	1 LHA	76.400.000,00	
	c. Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi			
	1) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Aceh	1 LHA	125.800.000,00	
	2) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Utara	1 LHA	121.000.000,00	
	3) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Riau	1 LHA	142.700.000,00	
	4) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kepulauan Riau	1 LHA	137.200.000,00	
	5) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jambi	1 LHA	109.400.000,00	
	6) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Barat	1 LHA	126.300.000,00	
	7) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sumatera Selatan	1 LHA	139.900.000,00	
	8) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Lampung	1 LHA	93.600.000,00	
	9) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bengkulu	1 LHA	115.700.000,00	
	10) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bangka Belitung	1 LHA	119.500.000,00	
	11) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Banten	1 LHA	109.800.000,00	
	12) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Barat	1 LHA	101.300.000,00	
	13) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Tengah	1 LHA	103.200.000,00	
	14) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi D.I	1 LHA	141.900.000,00	
	15) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Jawa Timur	1 LHA	128.700.000,00	
	16) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Bali	1 LHA	161.600.000,00	
	17) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHA	128.200.000,00	
	18) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHA	135.900.000,00	
	19) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Barat	1 LHA	114.100.000,00	
	20) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHA	124.100.000,00	
	21) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHA	116.000.000,00	
	22) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Timur	1 LHA	151.900.000,00	

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	23) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Kalimantan Utara	1 LHA	149.900.000,00	
	24) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Utara	1 LHA	152.100.000,00	
	25) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Gorontalo	1 LHA	149.400.000,00	
	26) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Barat	1 LHA	149.400.000,00	
	27) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHA	148.300.000,00	
	28) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHA	167.400.000,00	
	29) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHA	147.000.000,00	
	30) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku	1 LHA	157.900.000,00	
	31) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Maluku Utara	1 LHA	142.700.000,00	
	32) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua	1 LHA	203.000.000,00	
	33) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat	1 LHA	187.200.000,00	
	34) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Barat Daya	1 LHA	187.200.000,00	
	35) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Tengah	1 LHA	203.000.000,00	
	36) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Selatan	1 LHA	203.000.000,00	
	37) Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi ke Provinsi Papua Pegunungan	1 LHA	203.000.000,00	
5	Standar Biaya Keluaran Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)			
	a. RSNI3 dengan Metode Pengembangan Standar	1 Standar	472.000.000,00	
	b. RSNI3 dengan Metode Adopsi Modifikasi	1 Standar	376.000.000,00	
	c. RSNI3 dengan Metode Adopsi Identik Terjemahan	1 Standar	223.000.000,00	
	d. RSNI3 dengan Metode Adopsi Republikasi- <i>Reprint</i>	1 Standar	55.940.000,00	
6	Standar Biaya Keluaran Pemantauan dan Evaluasi			
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	240.000.000,00	
7	Standar Biaya Keluaran Riset dan Inovasi			
	a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi	1 Kekayaan Intelektual	700.000.000,00	
	b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi	1 Purwarupa	500.000.000,00	
	c. Model Hasil Riset dan Inovasi	1 Model	250.000.000,00	
	d. Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi	1 Publikasi Global	150.000.000,00	
	e. Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi	1 Publikasi Nasional	60.000.000,00	
	f. Naskah Kebijakan Aktual Strategis	1 Naskah Kebijakan	50.000.000,00	
8	Standar Biaya Keluaran Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga			
	a. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Internal	1 Peraturan	100.000.000,00	
	b. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal	1 Peraturan	200.000.000,00	
9	Standar Biaya Keluaran Peraturan Presiden			
	a. Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana	1 Peraturan Presiden	220.000.000,00	
	b. Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks	1 Peraturan Presiden	440.000.000,00	
10	Standar Biaya Keluaran Peraturan Pemerintah			
	a. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana	1 Peraturan Pemerintah	260.000.000,00	
	b. Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks	1 Peraturan Pemerintah	520.000.000,00	
	Standar Biaya Keluaran Rancangan Undang-Undang			
11	Standar Biaya Keluaran Rancangan Undang-Undang			
	a. Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana	1 Undang-Undang	600.000.000,00	
	b. Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks	1 Undang-Undang	945.000.000,00	
12	Standar Biaya Keluaran Sosialisasi			
	a. Layanan Sosialisasi Berskala Kecil	1 Laporan	67.500.000,00	
	b. Layanan Sosialisasi Berskala Sedang	1 Laporan	135.000.000,00	
	c. Layanan Sosialisasi Berskala Besar	1 Laporan	303.000.000,00	
13	Standar Biaya Keluaran Kehumasan dan Informasi			
	Layanan Kehumasan dan Informasi	1 Layanan	458.000.000,00	
14	Standar Biaya Keluaran Layanan Bantuan Hukum			
	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	21.488.000,00	
15	Standar Biaya Keluaran Layanan Barang Milik Negara (BMN)			
	a. Layanan BMN untuk Satker Eselon I/ Setingkat	1 Layanan	139.000.000,00	
	b. Layanan BMN untuk Satker Vertikal Eselon II ke bawah	1 Layanan	10.000.000,00	
16	Standar Biaya Keluaran Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural			
	a. Penilaian kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan menggunakan Metode Sederhana/ Metode Sedang	1 Orang	1.240.000,00	
	b. Penilaian kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan menggunakan Metode Kompleks	1 Orang	1.825.000,00	

PENJELASAN
SBK UMUM

1. SBK Perencanaan dan Penganggaran

SBK perencanaan dan penganggaran merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan satu keluaran dokumen perencanaan dan penganggaran, berupa dokumen rencana strategis, dokumen rencana kerja, dan dokumen rencana kerja dan anggaran pada kementerian/lembaga. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Unit Eselon I
SBK layanan perencanaan dan penganggaran Unit Eselon I merupakan SBK layanan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan oleh Unit Eselon I untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain dan satuan kerja (satker) pada lingkup unit organisasinya.
- b. SBK Layanan Perencanaan dan Penganggaran untuk Kementerian/Lembaga
SBK layanan penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kementerian/lembaga merupakan SBK layanan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang digunakan oleh kementerian/lembaga untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain dan eselon I/setingkat pada lingkup kementerian/lembaganya.

2. SBK Laporan Kinerja (LAKIN)

SBK LAKIN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I
SBK layanan penyusunan LAKIN Unit Eselon I merupakan SBK layanan penyusunan LAKIN yang digunakan oleh Unit Eselon I untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain dan satker pada lingkup unit organisasinya dalam rangka penyusunan LAKIN Unit Eselon I.
- b. SBK Layanan Penyusunan LAKIN untuk Kementerian/Lembaga
SBK layanan penyusunan LAKIN untuk kementerian/lembaga merupakan SBK layanan penyusunan LAKIN yang digunakan oleh kementerian/lembaga untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain dan seluruh eselon I/setingkat dalam lingkup kementerian/lembaganya dalam rangka penyusunan LAKIN kementerian/lembaga.

3. SBK Pendidikan dan Pelatihan

SBK pendidikan dan pelatihan merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa peserta yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Pelatihan Struktural Kepemimpinan
SBK layanan pelatihan struktural kepemimpinan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pendidikan dan pelatihan penjurangan bagi pejabat/pegawai yang telah menduduki jabatan tertentu yang terdiri dari pelatihan struktural kepemimpinan pratama, pelatihan struktural kepemimpinan

administrator, dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas. Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPH Pasal 20).

b. SBK Layanan Pelatihan Dasar/Prajabatan

SBK layanan pelatihan dasar/prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pendidikan dan pelatihan bagi calon pegawai negeri sipil sebagai syarat pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil yang terdiri dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan pelatihan prajabatan kategori 1 (satu) dan kategori 2 (dua). Satuan biaya ini tidak termasuk:

- 1) biaya perjalanan dinas peserta *on campus*; dan
- 2) biaya perjalanan dinas mentor pada saat seminar rancangan proyek perubahan dan seminar proyek perubahan, dan pajak (PPH Pasal 20).

Pelatihan dengan *blended learning* adalah pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.

4. SBK Audit Kinerja

SBK audit kinerja merupakan besaran biaya yang digunakan oleh Aparat Pengawas Inter Pemerintah (APIP) untuk menghasilkan keluaran audit kinerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas, antara lain:

- a. audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- b. audit atas penerimaan, penyaluran, dan penggunaan dana; dan/atau
- c. audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.

Satuan biaya ini hanya digunakan untuk kegiatan audit kinerja yang dalam pelaksanaannya dilakukan satu kali uji petik.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Perkantoran yang Sama
SBK layanan audit kinerja dalam perkantoran yang sama merupakan SBK layanan audit kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di lokasi perkantoran yang sama dengan lokasi satker APIP.
- b. SBK Layanan Audit Kinerja Dalam Kota
SBK layanan audit kinerja dalam kota merupakan SBK layanan audit kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berada di dalam kota yang sama dengan lokasi satker APIP.
- c. SBK Layanan Audit Kinerja Luar Provinsi
SBK layanan audit kinerja luar provinsi merupakan SBK layanan audit kinerja yang digunakan dalam rangka audit kinerja yang lokasi objek pemeriksaannya berbeda provinsi dengan lokasi satker APIP.

5. SBK Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (RSNI3)

SBK RSNI3 merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Standar RSNI3 yang dihasilkan pada tahap pembahasan konsep sampai dengan tahap konsensus dari Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) tingkat kementerian/lembaga.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. RSNI3 yang disusun dengan metode pengembangan sendiri yaitu metode perumusan RSNI3 dengan cara penyusunan sendiri

berdasarkan data/hasil penelitian dan menggunakan referensi dokumen acuan yang tertelusur.

- b. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi modifikasi yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara modifikasi dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- c. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi identik terjemahan yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan terjemahan bahasa Indonesia mengacu pada bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.
- d. RSNI3 yang disusun dengan metode adopsi republikasi-*reprint* yaitu metode perumusan RSNI3 dengan mengadopsi standar atau publikasi internasional secara identik dengan cara publikasi ulang menggunakan bahasa asli standar atau publikasi internasional yang diadopsi.

Dalam penyusunan RSNI3, besaran biaya ditentukan oleh keluaran akhir berupa Standar RSNI3 dan metode perumusan RSNI3 yang dipilih.

6. SBK Pemantauan dan Evaluasi

SBK pemantauan dan evaluasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran dokumen pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan atas kebijakan strategis, meliputi pemantauan, pengamatan, pencatatan, pemantauan, penilaian serta pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah melalui kegiatan visitasi lapangan.

7. SBK Riset dan Inovasi

SBK riset dan inovasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk kegiatan riset dan inovasi. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau pencrapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial, yang terdiri dari:

a. Kekayaan Intelektual Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa Kekayaan Intelektual. Kekayaan intelektual berupa hak cipta atau *copyright*, paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), perlindungan varietas tanaman/PVT (*plant variety protection*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*), serta indikasi geografis.

b. Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi

SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa purwarupa. Purwarupa adalah hasil kegiatan riset dan inovasi yang dapat menjadi hasil akhir atau bagian dari hasil akhir sebagai proses pembuktian fungsi yang direncanakan, seperti material untuk produk biologi, material/spesimen/jenis kekayaan hayati penambah, material/spesimen/jenis kekayaan hayati baru, galur perbaikan, purwarupa laik industri, jenis fauna penangkaran, domestikasi, *breeding*, temuan senyawa/*sequence* DNA penambah, temuan senyawa/*sequence* DNA baru, protokol riset keanekaragaman hayati, jenis benih/bibit/varietas/*strain* unggul hasil propagasi, domestikasi, *breeding*, atau jenis/bentuk rupa awal (pertama) dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi.

- c. **Model Hasil Riset dan Inovasi**
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa Model. Model yang dimaksud di sini dapat berupa konsep, pendekatan, model, kerangka pikir, metode, sistem, strategi, perspektif, peta jalan (*road map*), inovasi sosial tertentu, atau jenis/bentuk lain dari Model dari hasil riset dan inovasi yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi.
- d. **Publikasi Bereputasi Global Hasil Riset dan Inovasi**
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi global. Publikasi bereputasi global adalah publikasi yang diterbitkan/disebarluaskan dan terindeks global. Ketentuan terindeks global ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi.
- e. **Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi**
SBK ini digunakan untuk aktivitas riset dan inovasi dengan output berupa publikasi bereputasi nasional. Publikasi bereputasi nasional adalah publikasi yang diterbitkan/disebarluaskan dan terindeks nasional. Ketentuan terindeks secara nasional ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi.
- f. **Naskah Kebijakan Aktual Strategis**
SBK ini digunakan untuk menghasilkan keluaran naskah kebijakan/rekomendasi dari kegiatan riset kebijakan, pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data ilmiah dalam waktu pendek (kurang dari 4 (empat) bulan) yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus dengan hasil akhir berupa naskah kebijakan/rekomendasi (Naskah Akademik, Naskah Urgensi, Monograf Kebijakan, Memo Kebijakan, Model Kebijakan, Kertas Kerja Kebijakan, Risalah Kebijakan, Artikel Kebijakan, atau bentuk lain dari naskah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang riset dan inovasi).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran penelitian mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban anggaran penelitian atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 8. **SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga**
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa peraturan menteri/pimpinan lembaga yang dihasilkan dari tahap penyusunan konsep, pembahasan, penetapan, sampai dengan tahap pengundangan peraturan menteri/pimpinan lembaga.
Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. **SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Internal**
SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat internal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat hanya ke dalam kementerian/lembaga berkenaan.
 - b. **SBK Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Bersifat Eksternal**

SBK peraturan menteri/pimpinan lembaga yang bersifat eksternal merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan peraturan menteri/pimpinan lembaga yang penetapannya bersifat mengatur dan mengikat ke luar kementerian/lembaga berkenaan.

9. SBK Peraturan Presiden

SBK Peraturan Presiden merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Presiden yang dihasilkan dari tahap persiapan dan koordinasi, penyusunan dan pembahasan serta finalisasi.

Dalam hal SBK Peraturan Presiden diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Presiden.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Presiden yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Presiden yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Presiden yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Presiden yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

10. SBK Peraturan Pemerintah

SBK Peraturan Pemerintah merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Peraturan Pemerintah yang dihasilkan dari tahap persiapan dan koordinasi, penyusunan dan pembahasan serta finalisasi.

Dalam hal SBK Peraturan Pemerintah diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian Peraturan Pemerintah.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Sederhana

SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

b. SBK Peraturan Pemerintah yang Bersifat Kompleks

SBK Peraturan Pemerintah yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan Peraturan Pemerintah yang jumlah pasalnya lebih dari 25 (dua puluh lima) pasal dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

11. SBK Rancangan Undang-Undang

SBK rancangan Undang-Undang merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa rancangan Undang-Undang yang dihasilkan dari tahap penyusunan naskah akademis dan rancangan, pembahasan, uji publik, dan finalisasi.

Dalam hal SBK rancangan Undang-Undang diselesaikan lebih dari satu tahun anggaran maka besaran SBK ini merupakan akumulasi dari waktu pelaksanaan penyelesaian rancangan Undang-Undang.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

a. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Sederhana

SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat sederhana merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-

Undang yang jumlah pasalnya tidak lebih dari 50 (lima puluh) dan/atau melibatkan tidak lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

- b. SBK Rancangan Undang-Undang yang Bersifat Kompleks
SBK rancangan Undang-Undang yang bersifat kompleks merupakan SBK yang digunakan dalam rangka menghasilkan rancangan Undang-Undang yang jumlah pasalnya lebih dari 50 (lima puluh) dan melibatkan lebih dari 5 (lima) kementerian/lembaga/instansi.

12. SBK Sosialisasi

SBK sosialisasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan/menyebarkan informasi kepada pihak terkait yang meliputi tahap perencanaan kebutuhan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penyusunan laporan sosialisasi dan/atau diseminasi.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Kecil
SBK layanan sosialisasi berskala kecil merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi dengan jumlah peserta paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang.
- b. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Sedang
SBK layanan sosialisasi berskala sedang merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi dengan jumlah peserta paling sedikit 400 (empat ratus) orang.
- c. SBK Layanan Sosialisasi Berskala Besar
SBK layanan sosialisasi berskala besar merupakan SBK yang digunakan dalam rangka sosialisasi dan/atau diseminasi dengan jumlah peserta paling sedikit 500 (lima ratus) orang.

13. SBK Kehumasan dan Informasi

SBK kehumasan dan informasi merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi kebijakan kementerian/lembaga yang dilakukan dalam rangka kegiatan komunikasi publik/siaran pers.

14. SBK Layanan Bantuan Hukum

SBK layanan bantuan hukum merupakan besaran biaya yang digunakan untuk layanan bantuan hukum dalam menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum yang diberikan kepada pegawai di internal kementerian/lembaga. Lingkup bantuan hukum yang diberikan adalah perkara hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang melibatkan pegawai internal kementerian/lembaga. SBK layanan bantuan hukum untuk penyelesaian 1 (satu) layanan perkara hukum pegawai internal kementerian/lembaga.

15. SBK Layanan Barang Milik Negara (BMN)

SBK layanan BMN merupakan besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran berupa layanan yang dilaksanakan dalam rangka pcnatausahaan, penilaian, pengalihan, monitoring dan penyusunan laporan BMN. Besaran biaya tersebut tidak termasuk biaya pengadaan, pemeliharaan dan asuransi BMN. Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK Layanan BMN untuk Satker Eselon I/Setingkat
SBK layanan BMN untuk satker eselon I/setingkat merupakan SBK layanan BMN yang digunakan oleh satker unit organisasi lini kementerian/lembaga setingkat yang memiliki kewenangan dan

tanggung jawab penggunaan anggaran dan dipimpin oleh pejabat eselon I/setingkat.

- b. SBK Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)
SBK layanan BMN untuk satker vertikal (eselon II ke bawah) merupakan SBK layanan BMN yang digunakan oleh satker yang dipimpin oleh pejabat eselon II/setingkat ke bawah.

16. SBK Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural merupakan besaran biaya yang digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa pegawai yang telah mengikuti kegiatan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan menggunakan metode *Assessment Center* atau metode penilaian lainnya.

Penggunaan SBK ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- a. SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural terdiri atas metode sederhana/sedang dan metode kompleks;
- b. Komponen biaya SBK penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural tidak diperkenankan untuk membiayai pemberian honorarium bagi pejabat fungsional asesor sumber daya manusia aparatur yang berasal dari kementerian/lembaga penyelenggara; dan
- c. Tata cara pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural berpedoman pada peraturan menteri/kepala lembaga yang mengatur mengenai pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR BIAYA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024

SBK KHUSUS

Kementerian Negara/Lembaga: Majelis Permusyawaratan Rakyat (001)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
001.02	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi			
	Forum			
	1 Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD	1 Forum	171.790.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat (002)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
002.02	Dewan Forum 1 Rumah Aspirasi Anggota DPR	1 Kegiatan	150.000.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Umr	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan			
	Pemeriksaan Keuangan Negara			
1	LHP LKPP	1 LHP	11 246 296.000,00	
2	LHP AKN I	1 LHP	7 626 675 000,00	
3	LHP AKN II	1 LHP	8 104.691 000,00	
4	LHP AKN III	1 LHP	3 502 112.000,00	
5	LHP AKN IV	1 LHP	7 011 476 000,00	
6	LHP AKN V	1 LHP	5 278 129.000,00	
7	LHP AKN VI	1 LHP	5 026 851 000,00	
8	LHP AKN VII	1 LHP	3 505 142.000,00	
9	LHP BPK Perwakilan Provinsi Aceh	1 LHP	850 005.000,00	
10	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	1 LHP	805 605 000,00	
11	LHP BPK Perwakilan Provinsi Riau	1 LHP	489 739.000,00	
12	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	1 LHP	754 589.000,00	
13	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jambi	1 LHP	683 346 000,00	
14	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	1 LHP	730 612 000,00	
15	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	1 LHP	915 182.000,00	
16	LHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung	1 LHP	667 998 000,00	
17	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	1 LHP	721 310.000,00	
18	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 LHP	733 382.000,00	
19	LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten	1 LHP	812 668 000,00	
20	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	1 LHP	1.014.897.000,00	
21	LHP BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	1 LHP	5.168.937.000,00	
22	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	1 LHP	493 431 000,00	
23	LHP BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1 LHP	813 506.000,00	
24	LHP BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	1 LHP	1 087.511.000,00	
25	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	1 LHP	971 838 000,00	
26	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 LHP	854 061.000,00	
27	LHP BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 LHP	734 961.000,00	
28	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	1 LHP	668 477 000,00	
29	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	1 LHP	718 286.000,00	
30	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	1 LHP	731 893.000,00	
31	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	1 LHP	1 052 094 000,00	
32	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1 LHP	841 145.000,00	
33	LHP BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	1 LHP	861 769.000,00	
34	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	1 LHP	753 738 000,00	
35	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	1 LHP	787 353.000,00	
36	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1 LHP	833 361 000,00	
37	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 LHP	781 208.000,00	
38	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku	1 LHP	782 582.000,00	
39	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1 LHP	810 668 000,00	
40	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua	1 LHP	1 454.795.000,00	
41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	1 LHP	971 631.000,00	
42	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1 LHP	679 043 000,00	
43	LHP Tematik AKN I	1 LHP	8 429.366.000,00	
44	LHP Tematik AKN II	1 LHP	8 429 366.000,00	
45	LHP Tematik AKN III	1 LHP	8 429 366 000,00	
46	LHP Tematik AKN IV	1 LHP	8 429.366.000,00	
47	LHP Tematik AKN V	1 LHP	8 429 366.000,00	
48	LHP Tematik AKN VI	1 LHP	8 429.366 000,00	
49	LHP Tematik AKN VII	1 LHP	8 429.366.000,00	
50	LHP Auditorial Umum Investigasi	1 LHP	2 744 074 000,00	
51	Laporan Pemantauan Informasi Awal	1 Laporan	150 602 000,00	
52	Laporan Pemberian Keterangan AMU	1 Laporan	74.186.000,00	
53	LHP atas Hartanah Keuangan Partis. Publik pada AKN V	1 Laporan	12 500 000,00	
54	Bahasa Pemantauan Pembalap AKN II	1 Laporan	15.000.000,00	
55	Sumbangan HPS AKN II	1 Laporan	12 500.000,00	
56	Laporan Profil Sintaks AKN II	1 Laporan	9 000 000,00	
57	Laporan Profil Sintaks AKN V	1 Laporan	10.000.000,00	
58	Laporan Profil Sintaks AKN VI	1 Laporan	10.000.000,00	
59	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN IV	1 Laporan	50 000.000,00	
60	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN V	1 Laporan	21.500.000,00	
61	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AKN VI	1 Laporan	20 500.000,00	
62	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada AKN I	1 Laporan	20 500.000,00	
63	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada AKN II	1 Laporan	13.000.000,00	
64	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada AKN III	1 Laporan	13 500.000,00	
65	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada AKN IV	1 Laporan	31 500.000,00	
66	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada AKN V	1 Laporan	30 000.000,00	
67	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada AKN VI	1 Laporan	18 000 000,00	
68	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN I	1 Laporan	3 000 000,00	
69	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN II	1 Laporan	11 500.000,00	
70	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN III	1 Laporan	9 000 000,00	
71	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN IV	1 Laporan	10 000 000,00	
72	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN V	1 Laporan	18 800 000,00	
73	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN VI	1 Laporan	15 500 000,00	
74	Layanan Manajemen Pemeriksaan AKN VII	1 Laporan	11 000 000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Agung (005)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
005.02	Kepaniteraan Perkara Hukum Perseorangan			
	1 Putusan Perkara Pidana	1 Perkara	1.664.000,00	
	2 Putusan Perkara Pidana Militer	1 Perkara	950.000,00	
	3 Putusan Perkara PHI yang Nilai Gugatannya di Bawah 150 juta	1 Perkara	835.000,00	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Perkara Hukum Perseorangan			
	1 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat	1 Perkara	715.000,00	
	2 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Barat	1 Perkara	915.000,00	
	3 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 Perkara	865.000,00	
	4 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 Perkara	1.190.000,00	
	5 Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	1 Perkara	1.440.000,00	
	6 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	1 Perkara	765.000,00	
	7 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Tengah	1 Perkara	965.000,00	
	8 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	915.000,00	
	9 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	1.050.000,00	
	10 Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	1 Perkara	1.370.000,00	
	11 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	1 Perkara	715.000,00	
	12 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Banding di Wilayah Timur	1 Perkara	1.030.000,00	
	13 Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	815.000,00	
	14 Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	1.250.000,00	
	15 Perkara PHI (di bawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Timur	1 Perkara	1.600.000,00	
005.05	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Perkara Hukum Perseorangan			
	1 Perkara Perbedaan Keputusan yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	1 Perkara	710.000,00	
	2 Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III	1 Perkara	420.000,00	
	3 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	1 Perkara	1.565.000,00	
	4 Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	1 Perkara	2.016.000,00	
	5 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	1 Perkara	110.000,00	
	6 Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	1 Perkara	208.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia			
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat			
	1 Kopiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	14.080.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
	2 Lembaga Yang Telah Dileri Pencerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	9.460.000,00	
	Penanganan Perkara			
	3 Restoransi Justice Perkara Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	1.500.000,00	
	4 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	29.800.000,00	
	5 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di Papua dan Papua Barat	1 Perkara	50.000.000,00	
	6 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	100.000.000,00	
	7 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri di Papua dan Papua Barat	1 Perkara	116.000.000,00	
	8 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	36.000.000,00	
	9 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	1 Perkara	15.000.000,00	
	10 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I Papua dan Papua Barat	1 Perkara	75.000.000,00	
	11 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	1 Perkara	68.800.000,00	
	12 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Barat	1 Perkara	125.770.000,00	
	13 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Tengah	1 Perkara	119.950.000,00	
	14 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jawa Timur	1 Perkara	123.830.000,00	
	15 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Aceh	1 Perkara	118.980.000,00	
	16 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Utara	1 Perkara	119.950.000,00	
	17 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Barat	1 Perkara	120.920.000,00	
	18 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Riau	1 Perkara	119.950.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia (006)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	19 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Jambi	1 Perkara	119.950.000,00	
	20 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sumatera Selatan	1 Perkara	120.920.000,00	
	21 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Lampung	1 Perkara	120.920.000,00	
	22 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Barat	1 Perkara	239.220.000,00	
	23 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Tengah	1 Perkara	118.980.000,00	
	24 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Selatan	1 Perkara	273.220.000,00	
	25 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Timur	1 Perkara	240.770.000,00	
	26 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Utara	1 Perkara	326.870.000,00	
	27 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tengah	1 Perkara	256.350.000,00	
	28 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Selatan	1 Perkara	326.870.000,00	
	29 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Tenggara	1 Perkara	269.920.000,00	
	30 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku	1 Perkara	572.120.000,00	
	31 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Bali	1 Perkara	126.220.000,00	
	32 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Barat	1 Perkara	276.840.000,00	
	33 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Nusa Tenggara Timur	1 Perkara	125.770.000,00	
	34 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Papua	1 Perkara	452.720.000,00	
	35 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Bengkulu	1 Perkara	120.920.000,00	
	36 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Maluku Utara	1 Perkara	349.170.000,00	
	37 Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kepulauan Bangka Belitung	1 Perkara	203.730.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
38	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Gorontalo	1 Perkara	120.780.000,00	
39	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kepulauan Riau	1 Perkara	581.350.000,00	
40	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Papua Barat	1 Perkara	460.220.000,00	
41	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Barat	1 Perkara	130.290.000,00	
42	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Kalimantan Utara	1 Perkara	273.770.000,00	
43	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah I	1 Perkara	4.850.000,00	
44	Pelaksanaan eksekusi perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya terpidana ditahan dalam Rumah Tahanan Wilayah II	1 Perkara	7.440.000,00	
45	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	1 Perkara	37.280.000,00	
46	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Tidak Ditahan Dalam Rumah Tahanan	1 Perkara	50.520.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sekretariat Negara (007)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
007.01	 Sekretariat Negara Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 1. Analisis Kebijakan di Bidang Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 2. Analisis Bahan Kebijakan	: Rekomendasi Kebijakan, Nomin	615.500.000,00	
		: Rekomendasi Kebijakan, Nomin	239.215.500,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Dalam Negeri (010)

(dalam : rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	Sekretariat Jenderal			
	Standardisasi Profesi dan Sumber Daya Manusia			
	1 Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	3.834.333,00	
	2 Penilaian Kompetensi Jabatan Administrator, Pengawas, dan Fungsional di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	1.394.333,00	
	3 Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	1 Orang	4.312.000,00	
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	1 Pengembangan Kompetensi 3 Hari Bidang Standardisasi dan Sertifikasi	1 Orang	2.564.000,00	
	2 Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standardisasi dan Sertifikasi	1 Orang	2.914.166,00	
	3 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	1 Orang	2.564.000,00	
	4 Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Kepamongrahan dan Manajemen Sepemimpinan	1 Orang	2.564.000,00	
	5 Pengembangan Kompetensi 3 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	2.564.000,00	
	6 Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	1.843.833,00	
	7 Pengembangan Kompetensi 14 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	1 Orang	5.718.333,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Luar Negeri (011)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
011.01	Sekretariat Jenderal			
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	1 Layanan Penyelenggaraan Kebersihan	1 Dokumen	360.333.000,00	
011.04	Ditjen Kerja Sama ASEAN			
	Kebijakan Bidang Politik			
	2 Kerja Sama ASEAN Bidang Politik dan Keamanan	1 Rekomendasi Kebijakan	78.095.000,00	
	Koordinasi			
	3 Koordinasi Implementasi Kerja Sama ASEAN di Tingkat Nasional	1 Kegiatan	641.850.000,00	
011.08	Ditjen Protokol dan Konsuler			
	Pelayanan Publik pada Lembaga			
	4 Pelayanan Fasilitas Diplomatik	1 Lembaga	32.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	Kementerian Pertahanan			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
1	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	5.857.690,00	
2	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	5.998.320,00	
3	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	6.281.420,00	
4	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	5.893.130,00	
5	Perekrutan Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	10.438.420,00	
6	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	13.980.986,00	
7	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	14.341.413,00	
8	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	14.528.116,00	
9	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	14.456.853,00	
10	Latihan Dasar Militer Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	16.688.906,00	
11	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon I	1 Orang	1.566.314,00	
12	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon II	1 Orang	1.608.519,00	
13	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon III	1 Orang	1.662.905,00	
14	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon IV	1 Orang	1.613.605,00	
15	Latihan Penyegaran Komcad Golongan Perwira, Bintara dan Tamtama Rayon V	1 Orang	2.105.744,00	
16	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Bantuan dan Nasihat Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi)	1 Orang	8.997.000,00	
	Perkara Hukum Perseorangan			
17	Pendapat dan Saran Hukum (Legal Opinion)	1 Perkara	955.000,00	
	Perkara Hukum Lembaga			
18	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 1	1 Perkara	27.760.000,00	
19	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk I Rayon 2	1 Perkara	32.554.000,00	
20	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terhanding Tk-Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000,00	
21	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terhanding Tk-Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000,00	
22	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Terhanding Tk-Banding Rayon 3	1 Perkara	10.643.000,00	
23	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000,00	
24	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000,00	
25	Laporan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk Pk Rayon 1	1 Perkara	15.500.000,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
26	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 1	1 Orang	5.471.000,00	
27	Kursus Intensif Bahasa Inggris Gelombang 2	1 Orang	5.471.000,00	
28	Kursus Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Orang	5.471.000,00	
29	Kursus Intensif Bahasa Inggris Persiapan IELTS	1 Orang	5.471.000,00	
30	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 1	1 Orang	7.103.000,00	
31	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 2	1 Orang	7.103.000,00	
32	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 3	1 Orang	7.103.000,00	
33	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Gelombang 4	1 Orang	7.103.000,00	
34	Kursus Intensif Bahasa Indonesia bagi Perwira SAP	1 Orang	7.103.000,00	
35	Kursus Intensif Bahasa Indonesia Bagi Calon Mahasiswa Asing Ujian	1 Orang	7.103.000,00	
36	Kursus Intensif Bahasa Arab	1 Orang	5.471.000,00	
37	Kursus Intensif Bahasa Jepang	1 Orang	5.471.000,00	
38	Kursus Intensif Bahasa Jerman	1 Orang	5.471.000,00	
39	Kursus Intensif Bahasa Korea	1 Orang	5.471.000,00	
40	Kursus Intensif Bahasa Melayu	1 Orang	5.471.000,00	
41	Kursus Intensif Bahasa Perancis	1 Orang	5.471.000,00	
42	Kursus Intensif Bahasa Rusia	1 Orang	5.471.000,00	
43	Kursus Intensif Bahasa Inggris bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	1 Orang	5.471.000,00	
44	Kursus Intensif Bahasa Arab bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	1 Orang	5.471.000,00	
45	Kursus Intensif Bahasa Perancis bagi Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB	1 Orang	5.471.000,00	
46	Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan	1 Orang	7.847.600,00	
47	Kursus Manajemen Perencanaan Strategis Pertahanan	1 Orang	6.379.041,00	
48	Kursus Manajemen Perencanaan Dan Penganggaran Pertahanan	1 Orang	5.541.211,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	49 Kursus Manajemen Penelitian Dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Muda	1 Orang	5.931.611,00	
	50 Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Orang	5.888.055,00	
	51 Kursus Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pertahanan	1 Orang	5.606.983,00	
	52 Kursus Manajemen Penatausahaan Barang Milik Negara Pertahanan	1 Orang	5.391.755,00	
	53 Kursus Manajemen Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pertahanan	1 Orang	5.436.933,00	
	54 Kursus Manajemen Penelitian Dan Pengembangan Pertahanan Tingkat Pertama	1 Orang	5.610.733,00	
	55 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Cyber Defence	1 Orang	8.000.000,00	
	56 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat II	1 Orang	5.211.000,00	
	57 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Umum Tingkat III	1 Orang	5.341.000,00	
	58 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Alih Golongan dari Golongan II ke Golongan III bagi PNS	1 Orang	5.335.000,00	
	59 Diklat Kader Muda Bela Negara Tingkat SMA/Setingkat	1 Orang	1.241.000,00	
	60 Diklat Kader Muda Bela Negara Gabungan	1 Orang	1.241.000,00	
012.21	Markas Besar TNI			
	Operasi Bidang Pertahanan			
	1 Peserta Penugasan Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 operasi	369.368,00	
	2 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon I	1 operasi	84.500,00	
	3 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon II	1 operasi	87.500,00	
	4 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon III	1 operasi	86.500,00	
	5 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon IV	1 operasi	88.500,00	
	6 Perbatasan/Pulau Terluar Rayon V	1 operasi	91.500,00	
	7 Rahwan Rayon I	1 operasi	107.500,00	
	8 Rahwan Rayon II	1 operasi	110.500,00	
	9 Rahwan Rayon III	1 operasi	109.500,00	
	10 Rahwan Rayon IV	1 operasi	111.500,00	
	11 Rahwan Rayon V	1 operasi	114.500,00	
	12 Pembentukan Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	2.413.328,00	
	13 Kegiatan Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	6.571.805,00	
	14 Purna Tugas Satgas Yonmek UNIFIL	1 operasi	1.676.582,00	
	15 Pembentukan 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	2.499.074,00	
	16 Kegiatan Gabungan 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	3.228.602,00	
	17 Kegiatan Satgas MPU UNIFIL	1 operasi	5.223.250,00	
	18 Kegiatan Satgas FHQSU UNIFIL	1 operasi	2.824.903,00	
	19 Kegiatan Satgas MCOU UNIFIL	1 operasi	9.001.111,00	
	20 Kegiatan Satgas CIMIC UNIFIL	1 operasi	19.877.142,00	
	21 Kegiatan Satgas Level II UNIFIL	1 operasi	15.546.666,00	
	22 Gabungan Giar Siap dan Rotasi 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	2.874.458,00	
	23 Gabungan Purna Tugas 5 Satgas UNIFIL	1 operasi	1.852.135,00	
	24 Pembentukan Satgas MTF	1 operasi	4.515.008,00	
	25 Kegiatan Satgas MTF	1 operasi	11.771.453,00	
	26 Purna Tugas Satgas MTF	1 operasi	1.128.899,00	
	27 Pembentukan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	2.172.200,00	
	28 Kegiatan Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	7.212.794,00	
	29 Purna Tugas Satgas Yon RDB MONUSCO	1 operasi	1.612.952,00	
	30 Pembentukan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 operasi	2.802.560,00	
	31 Kegiatan Satgas Yon KIZI MONUSCO	1 operasi	6.227.131,00	
	32 Giar Siap dan Rotasi Satgas KIZI MONUSCO	1 operasi	2.429.628,00	
	33 Purna Tugas Satgas KIZI MONUSCO	1 operasi	1.866.828,00	
	34 Pembentukan Satgas Kizi Minusca Car	1 operasi	2.417.029,00	
	35 Kegiatan Satgas Minusca Car	1 operasi	8.674.858,00	
	36 Purna Tugas Satgas Kzi Minusca Car	1 operasi	1.337.837,00	
	37 Pembentukan Military Expert on Mission	1 operasi	1.810.275,00	
	38 Kegiatan Military Expert on Mission	1 operasi	15.498.525,00	
	39 Peserta Operasi Rutin Integratif	1 operasi	75.000,00	
	40 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon I	1 operasi	163.648,00	
	41 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon II	1 operasi	166.648,00	
	42 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon III	1 operasi	172.748,00	
	43 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon IV	1 operasi	173.748,00	
	44 Peserta Operasi Intelijen Rutin Rayon V	1 operasi	181.848,00	
	45 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Tahwil Rayon I	1 operasi	124.441,00	
	46 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Tahwil Rayon II	1 operasi	131.441,00	
	47 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Tahwil Rayon III	1 operasi	130.441,00	
	48 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Tahwil Rayon IV	1 operasi	136.441,00	
	49 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Tahwil Rayon V	1 operasi	139.441,00	
	50 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Komso TNI Terpusat	1 operasi	230.520,00	
	51 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Komso TNI Rayon I	1 operasi	244.657,00	
	52 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Komso TNI Rayon II	1 operasi	251.657,00	
	53 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Komso TNI Rayon III	1 operasi	250.657,00	
	54 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Komso TNI Rayon IV	1 operasi	256.657,00	
	55 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Komso TNI Rayon V	1 operasi	259.657,00	
	56 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Operasi Teritorial Rayon I	1 operasi	107.605,00	
	57 Peserta Operasi Teritorial Integratif Giar Operasi Teritorial Rayon II	1 operasi	114.605,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
58	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon III	1 operasi	113.605,00	
59	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon IV	1 operasi	119.605,00	
60	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Operasi Teritorial Rayon V	1 operasi	122.605,00	
61	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon I	1 operasi	99.110,00	
62	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon II	1 operasi	106.110,00	
63	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon III	1 operasi	105.110,00	
64	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon IV	1 operasi	111.110,00	
65	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Karya Bakti di Daerah Rayon V	1 operasi	114.110,00	
66	Peserta Operasi Teritorial Integratif Giat Pemas, Pam Bahwan dan Pam Puter	1 operasi	185.500,00	
67	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI	1 operasi	507.702,00	
68	Peserta Operasi Siber TNI Operasi Bidang Keamanan	1 operasi	295.915,00	
69	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah I	1 operasi	159.455,00	
70	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah II	1 operasi	169.375,00	
71	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah III	1 operasi	168.135,00	
72	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah IV	1 operasi	174.335,00	
73	Penggelaran Satgas Operasi Perbantuan TNI kepada Polri Wilayah V	1 operasi	186.735,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
74	Seleksi Penerimaan (Waving) Calon Pa PK TNI	1 Orang	18.435.359,00	
75	Seleksi Penerimaan (Werving) Calon Pa PSDP Pmb TNI	1 Orang	19.700.514,00	
76	Seleksi Penerimaan (Werving) Mahasiswa Beasiswa TNI Calon Pa PK TNI	1 Orang	20.211.288,00	
77	Penerimaan CPNS L0 Mabes TNI	1 Orang	1.699.790,00	
78	Dokter Alih PNS	1 Orang	7.795.375,00	
79	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Pria)	1 Orang	5.083.000,00	
80	Lulusan Dikma Chandradimuka Capratar (Wanita)	1 Orang	5.083.000,00	
81	Pendidikan Pertama PSIP Penerbang TNI	1 Orang	8.738.276,00	
82	Pendidikan Lanjutan PSDP FN4 TNI	1 Orang	7.743.202,00	
83	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria Reguler TNI	1 Orang	6.290.149,00	
84	Pendidikan Pertama Pa PK Wanita Reguler TNI	1 Orang	4.866.720,00	
85	Seleksi Casis Dikreg Sesko TNI	1 Orang	6.249.385,00	
86	Lulusan Susko TNI	1 Orang	6.806.000,00	
87	Lulusan Dikbangspes Suspa TNI	1 Orang	5.370.583,00	
88	Lulusan Dikbangspes Susba TNI	1 Orang	4.740.583,00	
89	Lulusan Dikbangspes SIP TNI	1 Orang	15.960.316,00	
90	Lulusan Dikbangspes Susabkumil	1 Orang	5.434.200,00	
91	Lulusan Dikbangspes Susjabomil	1 Orang	5.549.466,00	
92	Lulusan Dikbangspes Suspati Bintal	1 Orang	5.556.000,00	
93	Lulusan Dik SAR TNI	1 Orang	5.575.416,00	
94	Lulusan Kursus Penanggulangan Bencana Alam	1 Orang	5.575.416,00	
95	Kursus Dasar Perwira Intelijen	1 Orang	3.275.000,00	
96	Kursus Perwira Kontra Intelijen	1 Orang	3.556.000,00	
97	Kursus Perwira Intelijen Strategis	1 Orang	3.240.000,00	
98	Kursus Perwira Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.933.333,00	
99	Kursus Bintara Sandi Dan Intelijen	1 Orang	4.666.000,00	
100	Kursus Dasar Bintara Intelijen	1 Orang	4.725.000,00	
101	Kursus Perwira Intelijen Siber	1 Orang	5.760.000,00	
102	Kursus Bintara Intelijen Siber	1 Orang	3.651.851,00	
103	Kursus Perwira Intelijen Medis	1 Orang	5.507.777,00	
104	Kursus Perwira Intelijen Ekonomi	1 Orang	6.072.222,00	
105	Pembekalan Intelijen	1 Orang	1.200.000,00	
106	Kursus Perwira Interogator	1 Orang	6.078.000,00	
107	Kursus Bintara Interogator	1 Orang	3.950.000,00	
108	Seleksi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.785.287,00	
109	Kursus Bahasa Inggris Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.211.262,00	
110	Kursus Komputer Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303,00	
111	Kursus Sandi Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.725.303,00	
112	Seleksi Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.949.221,00	
113	Seleksi Kursus Perwira Intelijen	1 Orang	901.166,00	
114	Seleksi Kursus Bintara Intelijen	1 Orang	870.600,00	
115	Penataran/Latihan Gabungan Bangspes	1 Orang	167.000,00	
116	Penataran/Latihan PA Bangspes	1 Orang	167.000,00	
117	Penataran/Latihan BA Bangspes	1 Orang	165.750,00	
118	Penataran/Latihan TA Bangspes	1 Orang	164.500,00	
119	Sekolah Manajemen Dan Analisis Intelijen (SMALI)	1 Orang	10.646.000,00	
120	Kursus Perwira Intelijen Teknik	1 Orang	6.066.666,00	
121	Kursus Bintara Intelijen Teknik	1 Orang	5.928.000,00	
122	Kursus Perwira Intelijen Strategis Atase Pertahanan RI	1 Orang	4.943.502,00	
123	Kursus Perwira Penggalangan	1 Orang	5.700.000,00	
124	Kursus Perwira PCI	1 Orang	5.653.333,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
125	Kursus Perwira Itipers	1 Orang	5.706.666,00	
126	Kursus Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.819.209,00	
127	Penataran Istri Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.677.966,00	
128	Kursus Dasar Perwira Intelijen Teritorial	1 Orang	5.555.555,00	
129	Kursus Dasar Bintara Imajin Teritorial	1 Orang	4.706.666,00	
130	Lulusan Sekolah Terpadu TNI	1 Orang	9.798.272,00	
131	Kursus Sandi Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.662.932,00	
132	Kursus Perwira Intelijen Strategis Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.400.000,00	
133	Kursus Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.900.000,00	
134	Penataran Istri Asisten Atase Pertahanan RI	1 Orang	6.131.212,00	
135	Kursus Bahasa Inggris Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.909.604,00	
136	Kursus Komputer Atase Pertahanan RI	1 Orang	5.662.932,00	
137	Lulusan Kursus Perwira Siber TNI	1 Orang	5.922.750,00	
138	Seleksi Sus Jab Oditor Militer	1 Orang	6.188.333,00	
139	Seleksi Sus Jab Hakim Militer	1 Orang	6.188.333,00	
140	Pendidikan Pertama (Dikma) Pa PK Pria Sugsakes TNI	1 Orang	6.628.742,00	
141	Pendidikan Pertama Pa PK Wanita Sugsakes TNI	1 Orang	6.567.440,00	
142	Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan Barang & Jasa	1 Orang	5.152.833,00	
143	Lulusan Kursus Manajemen Auditor Ahli Pertama TNI	1 Orang	5.021.166,00	
144	Lulusan Kursus Perwira Perencanaan Anggaran TNI	1 Orang	4.975.277,00	
145	Lulusan Kursus Perwira Administrasi Keuangan	1 Orang	5.186.083,00	
Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan				
146	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	1.411.923,00	
147	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	127.441,00	
148	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah I	1 Orang	142.138,00	
149	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah II	1 Orang	142.738,00	
150	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah III	1 Orang	143.338,00	
151	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah IV	1 Orang	143.938,00	
152	Peserta Latihan Kesiapsiagaan Operasi Wilayah V	1 Orang	144.538,00	
153	Peserta Latihan Menembak Senjata Ringan Balakpus TNI	1 Orang	163.616,00	
154	Peserta Latihan Fungsi Teknis Balakpus TNI	1 Orang	134.875,00	
155	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah II)	1 Orang	106.104,00	
156	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah III)	1 Orang	108.633,00	
157	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah IV)	1 Orang	113.804,00	
158	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah V)	1 Orang	118.975,00	
159	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pantas/Rahwan (Wilayah VI)	1 Orang	127.001,00	
160	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah II)	1 Orang	101.407,00	
161	Peserta Latihan Pratugas Operasi Pam Ambalat/Puter (Wilayah III)	1 Orang	103.691,00	
162	Peserta Latihan Pratugas Operasi Satgas Intel	1 Orang	165.159,00	
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				
163	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 1	1 Orang	139.000,00	
164	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 2	1 Orang	146.000,00	
165	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 3	1 Orang	159.500,00	
166	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 4	1 Orang	152.500,00	
167	Pembinaan Napi Prajurit TNI Rayon 5	1 Orang	227.000,00	
168	Petunjuk Pembinaan Napi Prajurit	1 Orang	2.650.000,00	
Perkara Hukum Perseorangan				
169	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	17.930.000,00	
170	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	33.430.000,00	
171	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	57.000.000,00	
172	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	49.860.000,00	
173	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	160.670.000,00	
174	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 1	1 Perkara	105.410.000,00	
175	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 2	1 Perkara	126.660.000,00	
176	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 3	1 Perkara	147.910.000,00	
177	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 4	1 Perkara	147.910.000,00	
178	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer di Otmulti Rayon 5	1 Perkara	197.410.000,00	
179	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Perkara	5.350.000,00	
180	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	5.460.000,00	
181	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	6.083.000,00	
182	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	6.625.000,00	
183	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	5.614.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
184	Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	19.811.000,00	
185	Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Militer	1 Perkara	8.400.000,00	
186	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 1	1 Perkara	1.150.000,00	
187	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 2	1 Perkara	1.230.000,00	
188	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 3	1 Perkara	1.205.000,00	
189	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 4	1 Perkara	1.150.000,00	
190	Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pelanggaran Pidana Militer Rayon 5	1 Perkara	2.950.000,00	
191	Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana	1 Perkara	8.470.000,00	
192	Lelang Sita Rampasan	1 Perkara	46.075.000,00	
193	Eksekusi Orang/Burung	1 Perkara	17.282.000,00	
194	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.I	1 Perkara	19.884.000,00	
195	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	13.718.000,00	
196	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	11.518.000,00	
197	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	13.430.000,00	
198	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.I	1 Perkara	29.120.000,00	
199	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	16.243.000,00	
200	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	12.667.000,00	
201	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	18.748.000,00	
202	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk I	1 Perkara	45.922.000,00	
203	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Perkara	20.783.000,00	
204	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Perkara	26.883.000,00	
205	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Perkara	24.435.000,00	
206	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat TK I	1 Perkara	122.809.000,00	
207	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Perkara	22.255.000,00	
208	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Perkara	27.811.000,00	
209	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Perkara	27.296.000,00	
210	Bantuan dan Nasihat Hukum Non Litigasi	1 Perkara	16.838.000,00	
211	Pendapat dan Survei Hukum	1 Perkara	985.000,00	
212	Penyelidikan Perkara Pidana Prajurit	1 Perkara	23.530.000,00	
213	Penyelesaian Perkara Pelanggaran Prajurit	1 Perkara	2.255.000,00	
214	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana	1 Perkara	13.387.000,00	
215	Pengolahan Dan Penyelesaian Perkara Konksitas	1 Perkara	85.391.000,00	
216	Humorisasi Perang TNI	1 Perkara	36.750.000,00	
012.22	Markas Besar TNI AD			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
1	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	3.500.000,00	
2	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.000.000,00	
3	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	4.500.000,00	
4	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.000.000,00	
5	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Tingkat Kompi BS Dan Detasemen)	1 Orang	5.500.000,00	
6	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.000.000,00	
7	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Terpusat)	1 Orang	5.500.000,00	
8	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.000.000,00	
9	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Terpusat)	1 Orang	6.500.000,00	
10	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Terpusat)	1 Orang	7.000.000,00	
11	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.000.000,00	
12	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar)	1 Orang	6.500.000,00	
13	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.000.000,00	
14	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar)	1 Orang	7.500.000,00	
15	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar)	1 Orang	8.000.000,00	
16	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
17	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	7.500.000,00	
18	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.000.000,00	
19	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	8.500.000,00	
20	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Batalyon Tersebar Jauh)	1 Orang	9.000.000,00	
21	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	1.000.000,00	
22	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	4.500.000,00	
23	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.000.000,00	
24	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	5.500.000,00	
25	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Balakpus, Balakdam Dan Balak Aju)	1 Orang	6.000.000,00	
26	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	3.000.000,00	
27	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	3.500.000,00	
28	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.000.000,00	
29	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.500.000,00	
30	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.000.000,00	
31	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)	1 Orang	1.500.000,00	
32	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)	1 Orang	2.000.000,00	
33	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)	1 Orang	2.500.000,00	
34	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)	1 Orang	3.000.000,00	
35	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Korem Materi Latarsar Intel)	1 Orang	3.500.000,00	
36	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	3.500.000,00	
37	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.000.000,00	
38	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.500.000,00	
39	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.000.000,00	
40	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Mudah Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.500.000,00	
41	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.000.000,00	
42	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	4.500.000,00	
43	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.000.000,00	
44	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	5.500.000,00	
45	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Sulit Terjangkau Materi Latarsar Ter)	1 Orang	6.000.000,00	
46	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon I (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	1.000.000,00	
47	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon II (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	1.500.000,00	
48	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon III (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	2.000.000,00	
49	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon IV (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	2.500.000,00	
50	Latihan Perorangan Matra Darat Rayon V (Satuan Kodim Materi Latarsar Intel)	1 Orang	3.000.000,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
51	Kopdar Pria	1 Orang	4.950.000,00	
52	Kopdar Wanita	1 Orang	4.950.000,00	
53	Sersan Taruna Pria	1 Orang	5.193.000,00	
54	Sersan Taruna Wanita	1 Orang	5.193.000,00	
55	Seromadatar Pria	1 Orang	5.392.000,00	
56	Seromadatar Wanita	1 Orang	5.392.000,00	
57	Seramatutur Pria	1 Orang	5.587.000,00	
58	Seramatutur Wanita	1 Orang	5.587.000,00	
59	Dikmaba Pria Rayon I	1 Orang	3.593.000,00	
60	Dikmaba Pria Rayon II	1 Orang	3.643.000,00	
61	Dikmaba Pria Rayon III	1 Orang	3.808.000,00	
62	Dikmaba Pria Rayon IV	1 Orang	3.857.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
63	Dikmaba Pria Rayon V	1 Orang	4.051.000,00	
64	Dikmaba Wanita	1 Orang	3.393.000,00	
65	Dikmata Rayon I	1 Orang	3.393.000,00	
66	Dikmata Rayon II	1 Orang	3.440.000,00	
67	Dikmata Rayon III	1 Orang	3.601.000,00	
68	Dikmata Rayon IV	1 Orang	3.638.000,00	
69	Dikmata Rayon V	1 Orang	3.833.000,00	
70	Werving Taruna Matra Darat	1 Orang	26.605.100,00	
71	Werving Bintara Umum Matra Darat	1 Orang	6.650.074,00	
72	Werving Tamtama Matra Darat Umum	1 Orang	5.090.283,00	
73	Diktukpa Reg/Sus	1 Orang	3.975.000,00	
74	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 Orang	3.539.000,00	
75	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 Orang	3.586.000,00	
76	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 Orang	3.754.000,00	
77	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	3.804.000,00	
78	Lulusan Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 Orang	4.003.000,00	
79	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.690.000,00	
80	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.731.000,00	
81	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.738.000,00	
82	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.767.000,00	
83	Peserta Diktukpa Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.775.000,00	
84	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon I	1 Orang	1.307.000,00	
85	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon II	1 Orang	1.321.000,00	
86	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon III	1 Orang	1.360.000,00	
87	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon IV	1 Orang	1.384.000,00	
88	Peserta Diktukba Reg/Sus Rayon V	1 Orang	1.427.000,00	
89	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon I	1 Orang	4.169.666,00	
90	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon II	1 Orang	4.392.666,00	
91	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon III	1 Orang	4.541.000,00	
92	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon IV	1 Orang	4.569.000,00	
93	Diklat Alih Golongan dari Gol II ke Gol III PNS Rayon V	1 Orang	4.715.333,00	
94	Pendidikan Seskoad	1 Orang	5.090.000,00	
95	Diklapa I Cah Satpur/Banpur	1 Orang	4.148.000,00	
96	Diklapa I Cah Baumin	1 Orang	3.927.000,00	
97	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lembannas Rayon I	1 Orang	6.319.000,00	
98	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lembannas Rayon II	1 Orang	6.327.000,00	
99	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lembannas Rayon III	1 Orang	6.398.000,00	
100	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lembannas Rayon IV	1 Orang	6.387.000,00	
101	Peserta Seskoad/Sesko TNI/Lembannas Rayon V	1 Orang	6.472.000,00	
102	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon I	1 Orang	4.224.000,00	
103	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon II	1 Orang	4.184.000,00	
104	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon III	1 Orang	4.308.000,00	
105	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon IV	1 Orang	4.368.000,00	
106	Peserta Diklapa I/Diklapa II Rayon V	1 Orang	4.394.000,00	
107	Pelatihan Kepetimpunan Pengawas	1 Orang	16.755.000,00	
108	Dikbangspespa Cah Satpur/Banpur	1 Orang	3.917.000,00	
109	Dikbangspespa Cah Baumin	1 Orang	3.717.000,00	
110	Dikeah Perwira Satpur/Banpur	1 Orang	5.256.000,00	
111	Dikeab Perwira Baumin	1 Orang	5.011.000,00	
112	Dikbangspesba Rayon I	1 Orang	3.369.000,00	
113	Dikbangspesba Rayon II	1 Orang	3.415.000,00	
114	Dikbangspesba Rayon III	1 Orang	3.565.000,00	
115	Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.623.000,00	
116	Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.776.000,00	
117	Dikjur Bintara Rayon I	1 Orang	3.405.000,00	
118	Dikjur Bintara Rayon II	1 Orang	3.469.000,00	
119	Dikjur Bintara Rayon III	1 Orang	3.600.000,00	
120	Dikjur Bintara Rayon IV	1 Orang	3.643.000,00	
121	Dikjur Bintara Rayon V	1 Orang	3.816.000,00	
122	Diklomis PNS	1 Orang	6.549.000,00	
123	Dikbangspesba Rayon I	1 Orang	3.237.000,00	
124	Dikbangspesba Rayon II	1 Orang	3.281.000,00	
125	Dikbangspesba Rayon III	1 Orang	3.422.000,00	
126	Dikbangspesba Rayon IV	1 Orang	3.462.000,00	
127	Dikbangspesba Rayon V	1 Orang	3.651.000,00	
128	Dikjur Tamtama Rayon I	1 Orang	3.308.000,00	
129	Dikjur Tamtama Rayon II	1 Orang	3.358.000,00	
130	Dikjur Tamtama Rayon III	1 Orang	3.507.000,00	
131	Dikjur Tamtama Rayon IV	1 Orang	3.544.000,00	
132	Dikjur Tamtama Rayon V	1 Orang	3.722.000,00	
133	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon I	1 Orang	1.228.000,00	
134	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon II	1 Orang	1.287.000,00	
135	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon III	1 Orang	1.292.000,00	
136	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon IV	1 Orang	1.297.000,00	
137	Peserta Dikbangspes Pa/Ba/Ta Rayon V	1 Orang	1.342.000,00	
138	Pendidikan Keahlian Rayon I	1 Orang	3.946.000,00	
139	Pendidikan Keahlian Rayon II	1 Orang	3.975.000,00	
140	Pendidikan Keahlian Rayon III	1 Orang	4.134.000,00	
141	Pendidikan Keahlian Rayon IV	1 Orang	4.177.000,00	
142	Pendidikan Keahlian Rayon V	1 Orang	4.364.000,00	
143	Pendidikan Komando dan Kultur	1 Orang	5.099.000,00	
144	Pendidikan Spesialisasi Pasukan Khusus	1 Orang	3.976.000,00	
145	Dik Jpek S-1	1 Orang	3.812.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
146	Dik Iptek D 3 (Rayon I)	1 Orang	3.300.000,00	
147	Dik Iptek D-3 (Rayon II)	1 Orang	3.341.000,00	
148	Dik Iptek D 3 (Rayon III)	1 Orang	3.514.000,00	
149	Dik Iptek D-3 (Rayon IV)	1 Orang	3.559.000,00	
150	Dik Iptek D 3 (Rayon V)	1 Orang	3.762.000,00	
151	Dik Iptek SMK (Rayon I)	1 Orang	3.239.000,00	
152	Dik Iptek SMK (Rayon II)	1 Orang	3.285.000,00	
153	Dik Iptek SMK (Rayon III)	1 Orang	3.462.000,00	
154	Dik Iptek SMK (Rayon IV)	1 Orang	3.507.000,00	
155	Dik Iptek SMK (Rayon V)	1 Orang	3.701.000,00	
156	Dik Iptek D4 Matra Darat	1 Orang	3.746.000,00	
157	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon I	1 Orang	1.887.000,00	
158	Peserta Dik keahlian dan Iptek Rayon II	1 Orang	1.895.000,00	
159	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon III	1 Orang	1.926.000,00	
160	Peserta Dik keahlian dan Iptek Rayon IV	1 Orang	1.932.000,00	
161	Peserta Dik Keahlian dan Iptek Rayon V	1 Orang	1.937.000,00	
162	Diklapa II Cab Satpur/Banpur	1 Orang	4.182.000,00	
163	Diklapa II Cab Hamir	1 Orang	3.961.000,00	
164	Pratar Pria	1 Orang	5.083.000,00	
165	Pratar Wanita	1 Orang	5.083.000,00	
166	Latsar CPNS	1 Orang	5.260.000,00	
Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				
167	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon I	1 Orang	6.739.000,00	
168	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon II	1 Orang	7.224.000,00	
169	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon III	1 Orang	7.448.000,00	
170	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon IV	1 Orang	6.904.000,00	
171	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon V	1 Orang	16.720.000,00	
172	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Orang	2.554.000,00	
173	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Orang	2.584.000,00	
174	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Orang	3.039.000,00	
175	Pemlapan dan Saran Hukum Pidana (PSH Pidana)	1 Orang	933.000,00	
176	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon I	1 Orang	13.902.000,00	
177	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon II	1 Orang	15.852.000,00	
178	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon III	1 Orang	17.195.000,00	
179	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon IV	1 Orang	14.460.000,00	
180	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon V	1 Orang	54.302.000,00	
181	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Orang	4.681.000,00	
182	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Orang	3.608.000,00	
183	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Orang	6.550.000,00	
184	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon I	1 Orang	30.027.000,00	
185	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon II	1 Orang	34.276.000,00	
186	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon III	1 Orang	37.310.000,00	
187	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	31.414.000,00	
188	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I Rayon V	1 Orang	124.091.000,00	
189	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	8.716.000,00	
190	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	9.485.000,00	
191	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	10.021.000,00	
192	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	8.932.000,00	
193	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	25.638.000,00	
194	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	14.576.000,00	
195	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	15.965.000,00	
196	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	17.003.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
197	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	15.580.000,00	
198	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	41.291.000,00	
199	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	12.357.000,00	
200	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	13.168.000,00	
201	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	13.757.000,00	
202	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	12.717.000,00	
203	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	29.603.000,00	
204	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon I	1 Orang	27.906.000,00	
205	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon II	1 Orang	32.551.000,00	
206	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon III	1 Orang	35.856.000,00	
207	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon IV	1 Orang	29.238.000,00	
208	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon V	1 Orang	131.476.000,00	
209	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon I	1 Orang	10.114.000,00	
210	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon II	1 Orang	12.036.000,00	
211	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon III	1 Orang	13.416.000,00	
212	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon IV	1 Orang	10.613.000,00	
213	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon V	1 Orang	52.535.000,00	
214	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon I	1 Orang	15.285.000,00	
215	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon II	1 Orang	17.445.000,00	
216	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon III	1 Orang	19.035.000,00	
217	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon IV	1 Orang	16.515.000,00	
218	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon V	1 Orang	58.816.000,00	
219	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon I	1 Orang	15.510.000,00	
220	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon II	1 Orang	18.590.000,00	
221	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon III	1 Orang	20.790.000,00	
222	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon IV	1 Orang	16.390.000,00	
223	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon V	1 Orang	83.150.000,00	
224	Pendapat dan Saran Hukum Perdata (PSH Perdata)	1 Orang	926.000,00	
225	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon I	1 Orang	10.590.000,00	
226	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon II	1 Orang	11.329.000,00	
227	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon III	1 Orang	12.158.000,00	
228	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon IV	1 Orang	12.532.000,00	
229	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon V	1 Orang	44.711.000,00	
Perkara Hukum Perseorangan				
230	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon I	1 Perkara	9.115.000,00	
231	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon II	1 Perkara	9.620.000,00	
232	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon III	1 Perkara	10.395.000,00	
233	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon IV	1 Perkara	9.195.000,00	
234	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon V	1 Perkara	23.000.000,00	
235	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon I	1 Perkara	6.212.000,00	
236	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon II	1 Perkara	6.642.000,00	
237	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon III	1 Perkara	6.902.000,00	
238	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon IV	1 Perkara	6.357.000,00	
239	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon V	1 Perkara	13.917.000,00	
240	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon I	1 Perkara	2.315.000,00	
241	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon II	1 Perkara	2.480.000,00	
242	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon III	1 Perkara	2.585.000,00	
243	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon IV	1 Perkara	2.355.000,00	
244	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon V	1 Perkara	5.700.000,00	
245	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon I	1 Perkara	49.850,00	
246	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon II	1 Perkara	52.000,00	
247	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon III	1 Perkara	55.000,00	
248	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon IV	1 Perkara	50.000,00	
249	Pengurusan Tahanan Sementara Rayon V	1 Perkara	65.000,00	
250	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon I	1 Perkara	46.520,00	
251	Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon II	1 Perkara	48.810,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	252 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon III	1 Perkara	51.844,00	
	253 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon IV	1 Perkara	46.103,00	
	254 Pengurusan Tahanan Dalam Proses Penuntutan Rayon V	1 Perkara	60.931,00	
	255 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon I	1 Perkara	12.115.000,00	
	256 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon II	1 Perkara	12.920.000,00	
	257 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon III	1 Perkara	13.395.000,00	
	258 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon IV	1 Perkara	12.395.000,00	
	259 Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon V	1 Perkara	26.700.000,00	
	260 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon I	1 Perkara	116.761,00	
	261 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon II	1 Perkara	137.238,00	
	262 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon III	1 Perkara	140.238,00	
	263 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon IV	1 Perkara	143.761,00	
	264 Pengurusan Tahanan Hukuman Disiplin Rayon V	1 Perkara	167.285,00	
	265 Pengawasan Polisi Militer Rayon I	1 Perkara	360.000,00	
	266 Pengawasan Polisi Militer Rayon II	1 Perkara	370.000,00	
	267 Pengawasan Polisi Militer Rayon III	1 Perkara	380.000,00	
	268 Pengawasan Polisi Militer Rayon IV	1 Perkara	380.000,00	
	269 Pengawasan Polisi Militer Rayon V	1 Perkara	400.000,00	
012.23	Markas Besar TNI AL			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Latihan Kematraan	1 Orang	131.800,00	
	2 Latihan Pasukan Khusus	1 Orang	234.133,00	
	3 Latihan Satuan	1 Orang	108.928,00	
	4 Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri	1 Orang	940.217,00	
	5 Latihan Bersama Internasional Di Dalam Negeri	1 Orang	211.666,00	
	6 Latihan Perorangan Machir	1 Orang	31.000,00	
	7 Latihan Satuan Machir	1 Orang	96.000,00	
	8 Latihan Perorangan Taifib-Denjaka	1 Orang	95.000,00	
	9 Latihan Satuan Taifib-Denjaka	1 Orang	182.600,00	
	10 Latihan Intelejen TNI AL	1 Orang	304.000,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	11 Werving Calon Taruna/Taruna AAL	1 Orang	25.747.000,00	
	12 Werving Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	6.437.000,00	
	13 Werving Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	4.661.000,00	
	14 Peserta Diklapa	1 Orang	3.952.000,00	
	15 Peserta Dikutkpa Reguler dan Singkat	1 Orang	3.154.000,00	
	16 Peserta Dikutkpa Reguler dan Singkat	1 Orang	3.566.000,00	
	17 Peserta Kursus Manajemen Strategik	1 Orang	4.810.000,00	
	18 Peserta Seskod	1 Orang	5.101.000,00	
	19 Seleksi Dik D-3 STTAL	1 Orang	3.752.000,00	
	20 Seleksi Dik S 1 STTAL	1 Orang	3.904.000,00	
	21 Seleksi Dik S-2 STTAL	1 Orang	3.977.000,00	
	22 Peserta Dikspespa	1 Orang	2.771.000,00	
	23 Peserta Dikspesba	1 Orang	2.679.000,00	
	24 Peserta Dik Brevet	1 Orang	4.345.000,00	
	25 Peserta Penerbang TNI AL	1 Orang	6.620.000,00	
	26 Dikma Koptar Pria	1 Orang	4.918.000,00	
	27 Dikma Koptar Wanita	1 Orang	4.918.000,00	
	28 Dikma Sertar Pria	1 Orang	6.667.000,00	
	29 Dikma Sertar Wanita	1 Orang	6.667.000,00	
	30 Dikma Sermadatar Pria	1 Orang	6.952.000,00	
	31 Dikma Sermadatar Wanita	1 Orang	6.952.000,00	
	32 Dikma Sermatutur Pria	1 Orang	7.297.000,00	
	33 Dikma Sermatutur Wanita	1 Orang	7.297.000,00	
	34 Diksargolan Perwira/PA PK Matra Laut	1 Orang	5.520.000,00	
	35 Dikma Bintara Pria Matra Laut	1 Orang	3.947.000,00	
	36 Dikma Bintara Wanita Matra Laut	1 Orang	3.947.000,00	
	37 Diksargolan Bintara Matra Laut	1 Orang	3.707.000,00	
	38 Dikma Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.591.000,00	
	39 Diksargolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.389.000,00	
	40 Dik Sesekol	1 Orang	5.787.000,00	
	41 Diklapa Matra Laut	1 Orang	4.082.000,00	
	42 Dikutkpa Matra Laut	1 Orang	3.830.000,00	
	43 Dikutkba Matra Laut	1 Orang	3.639.000,00	
	44 Dikbangsus Perwira Matra Laut	1 Orang	4.150.000,00	
	45 Dikbangsus Bintara Matra Laut	1 Orang	3.616.000,00	
	46 Dikbangsus Tamtama Matra Laut	1 Orang	3.371.000,00	
	47 Diksus Manajemen Strategik Matra Laut	1 Orang	4.304.000,00	
	48 Diksus Penerbang Matra Laut	1 Orang	5.803.000,00	
	49 Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	4.694.000,00	
	50 Dik STTAL D 3	1 Orang	3.572.000,00	
	51 Dik STTAL S 1	1 Orang	3.936.000,00	
	52 Dik S-2 STTAL	1 Orang	4.248.000,00	
	53 Dikma Bintara Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.947.000,00	
	54 Diksargolan Bintara Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.707.000,00	
	55 Dikma Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.591.000,00	
	56 Diksargolan Tamtama Matra Laut di Tanjung Uban	1 Orang	3.389.000,00	
	57 Dikma Bintara Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.947.000,00	
	58 Diksargolan Bintara Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.707.000,00	
	59 Dikma Tamtama Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.591.000,00	
	60 Diksargolan Tamtama Matra Laut di Makassar	1 Orang	3.389.000,00	
	61 Dikma Bintara Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.947.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukmr	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
62	Diksurgolan Bintara Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.707.000,00	
63	Dikma Tamtama Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.591.000,00	
64	Diksurgolan Tamtama Matra Laut di Sorong	1 Orang	3.389.000,00	
65	Peserta Dikapesta	1 Orang	2.380.000,00	
66	Dikma Bintara Matra Laut di Manado	1 Orang	3.947.000,00	
67	Diksurgolan Bintara Matra Laut di Manado	1 Orang	3.707.000,00	
68	Dikma Tamtama Matra Laut di Manado	1 Orang	3.591.000,00	
69	Diksurgolan Tamtama Matra Laut di Manado	1 Orang	3.389.000,00	
70	Peserta Lemhannas	1 Orang	6.827.000,00	
71	Peserta Sesko TNI (TNI AL)	1 Orang	5.060.000,00	
72	Peserta SLS PTAL (Penanggulangan Teror Aspek Laut)	1 Orang	4.471.000,00	
73	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PkP) TNI AL	1 Orang	2.910.000,00	
74	Dikma Prajurit Pria	1 Orang	4.350.000,00	
75	Dikma Prajurit Wanita	1 Orang	4.350.000,00	
76	Werving Calon PA PK TNI Matra Laut	1 Orang	21.000.000,00	
	Perkara Hukum Perseorangan			
77	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Orang	9.115.000,00	
78	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Orang	9.620.000,00	
79	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Orang	10.395.000,00	
80	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Orang	9.195.000,00	
81	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Orang	23.000.000,00	
82	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 1	1 Orang	6.242.000,00	
83	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 2	1 Orang	6.642.000,00	
84	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 3	1 Orang	6.902.000,00	
85	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 4	1 Orang	6.357.000,00	
86	Penyelidikan Kriminal Perkara Pidana Rayon 5	1 Orang	13.917.000,00	
87	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Orang	2.315.000,00	
88	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Orang	2.480.000,00	
89	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Orang	2.385.000,00	
90	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Orang	2.355.000,00	
91	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Orang	5.700.000,00	
92	Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 1	1 Orang	-19.850,00	
93	Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 2	1 Orang	52.000,00	
94	Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 3	1 Orang	55.000,00	
95	Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 4	1 Orang	50.000,00	
96	Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 5	1 Orang	65.000,00	
97	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1	1 Orang	12.115.000,00	
98	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2	1 Orang	12.920.000,00	
99	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3	1 Orang	13.395.000,00	
100	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4	1 Orang	12.195.000,00	
101	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5	1 Orang	26.700.000,00	
102	Pengurusan Tabanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1	1 Orang	46.520,00	
103	Pengurusan Tabanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2	1 Orang	-18.810,00	
104	Pengurusan Tabanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3	1 Orang	51.844,00	
105	Pengurusan Tabanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4	1 Orang	46.103,00	
106	Pengurusan Tabanan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5	1 Orang	60.931,00	
107	Pengurusan Tabanan Hukuman Disiplin Rayon 1	1 Orang	126.761,00	
108	Pengurusan Tabanan Hukuman Disiplin Rayon 2	1 Orang	137.238,00	
109	Pengurusan Tabanan Hukuman Disiplin Rayon 3	1 Orang	140.238,00	
110	Pengurusan Tabanan Hukuman Disiplin Rayon 4	1 Orang	143.761,00	
111	Pengurusan Tabanan Hukuman Disiplin Rayon 5	1 Orang	167.285,00	
112	Penyidikan Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Perkara	53.825.000,00	
113	Pendapat dan Saran Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut	1 Perkara	966.000,00	
114	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 Rayon 1	1 Perkara	6.739.000,00	
115	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 Rayon 2	1 Perkara	7.224.000,00	
116	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 Rayon 3	1 Perkara	7.559.000,00	
117	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 Rayon 4	1 Perkara	6.904.000,00	
118	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk.1 Rayon 5	1 Perkara	16.720.000,00	
119	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Perkara	2.524.000,00	
120	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Perkara	2.564.000,00	
121	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Perkara	3.030.000,00	
122	Pendapat dan Saran Hukum Pidana Militer	1 Perkara	4.33.000,00	
123	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.1 Rayon 1	1 Perkara	13.902.000,00	
124	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.1 Rayon 2	1 Perkara	15.852.000,00	
125	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.1 Rayon 3	1 Perkara	17.195.000,00	
126	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.1 Rayon 4	1 Perkara	14.460.000,00	
127	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk.1 Rayon 5	1 Perkara	54.302.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
128	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Perkara	4.681.000,00	
129	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Perkara	3.608.000,00	
130	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.550.000,00	
131	Panilapat dan Saran Hukum Pidana Umum	1 Perkara	930.000,00	
132	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	30.027.000,00	
133	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	34.276.000,00	
134	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	37.310.000,00	
135	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	31.414.000,00	
136	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	124.091.000,00	
137	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 1	1 Perkara	8.716.000,00	
138	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 2	1 Perkara	9.185.000,00	
139	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 3	1 Perkara	10.021.000,00	
140	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 4	1 Perkara	8.932.000,00	
141	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Rayon 5	1 Perkara	25.638.000,00	
142	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon TK. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.576.000,00	
143	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon TK. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.965.000,00	
144	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon TK. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	17.003.000,00	
145	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon TK. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.580.000,00	
146	Bantuan dan Nasehat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon TK. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	41.291.000,00	
147	Bantuan dan Nasehat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	12.357.000,00	
148	Bantuan dan Nasehat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	13.108.000,00	
149	Bantuan dan Nasehat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	13.757.000,00	
150	Bantuan dan Nasehat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	12.747.000,00	
151	Bantuan dan Nasehat hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	29.603.000,00	
152	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 1	1 Perkara	27.906.000,00	
153	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 2	1 Perkara	32.554.000,00	
154	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 3	1 Perkara	35.856.000,00	
155	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	29.238.000,00	
156	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	131.476.000,00	
157	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000,00	
158	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	12.036.000,00	
159	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.416.000,00	
160	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000,00	
161	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	52.535.000,00	
162	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon TK. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000,00	
163	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon TK. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000,00	
164	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon TK. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	19.035.000,00	
165	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon TK. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.515.000,00	
166	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon TK. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	58.816.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
167	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.510.000,00	
168	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.590.000,00	
169	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.790.000,00	
170	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	16.390.000,00	
171	Bantuan dan Nasihat hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	83.150.000,00	
172	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 1	1 Perkara	10.590.000,00	
173	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 2	1 Perkara	11.329.000,00	
174	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 3	1 Perkara	12.158.000,00	
175	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 4	1 Perkara	12.532.000,00	
176	Bantuan Hukum Non Litigasi Rayon 5	1 Perkara	44.711.000,00	
177	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Penggugat	1 Perkara	926.000,00	
178	Pendapat dan Saran Hukum Perdata/Tun Tergugat	1 Perkara	926.000,00	
179	Penyelidikan Tindak Pidana Tertentu di Luar	1 Perkara	8.734.000,00	
012.23	Markas Besar TNI AU			
	Operasi Bidang Pertahanan			
1	Peserta Operasi Intel Taktis TNI	1 operasi	392.000,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
2	Peserta Latihan Kemahiran	1 Orang	95.718,00	
3	Peserta Latihan Bersama Internasional Di Luar Negeri	1 Orang	7.609.702,00	
4	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	185.394,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
5	Werving Taruna/Taruni	1 Orang	27.382.760,00	
6	Werving Bintara Matra Udara	1 Orang	6.845.708,00	
7	Werving Tamtama Matra Udara	1 Orang	4.936.880,00	
8	Peserta Seskoadu dan Sessau Matra Udara	1 Orang	2.561.700,00	
9	Seleksi Sekkau dan Suspajemen Matra Udara	1 Orang	1.756.200,00	
10	Peserta Setukpa Matra Udara	1 Orang	1.587.060,00	
11	Peserta Setukba Matra Udara	1 Orang	1.363.620,00	
12	Sertai Pria	1 Orang	6.271.265,00	
13	Sertai Wanita	1 Orang	6.271.265,00	
14	Pendidikan Seramadatar Pria	1 Orang	6.512.414,00	
15	Pendidikan Seramadatar Wanita	1 Orang	6.512.414,00	
16	Pendidikan Sermatular Pria	1 Orang	6.913.446,00	
17	Pendidikan Sermatular Wanita	1 Orang	6.913.446,00	
18	Lulusan Diksangolan Perwira Matra Udara	1 Orang	5.478.210,00	
19	Pendidikan Pertama Seraba Pria Matra Udara	1 Orang	3.265.690,00	
20	Pendidikan Pertama Seraba Wanita Matra Udara	1 Orang	3.265.690,00	
21	Lulusan Diksangolan Bintara Matra Udara Non ISD	1 Orang	3.304.941,00	
22	Lulusan Diksangolan Bintara Matra Udara ISD	1 Orang	3.304.941,00	
23	Pendidikan Pertama Seragam Pria Matra Udara	1 Orang	2.943.610,00	
24	Lulusan Diksangolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	3.005.358,00	
25	Pendidikan Sekbang/Seksnaw Matra Udara	1 Orang	7.054.322,00	
26	Pendidikan Sekbang/Seksnaw Matra Udara Lanjutan	1 Orang	7.054.323,00	
27	Pendidikan SIB/SIN Matra Udara	1 Orang	6.973.188,00	
28	Pendidikan Seskoadu	1 Orang	5.064.263,00	
29	Pendidikan Sessau	1 Orang	4.910.030,00	
30	Pendidikan Sekkau	1 Orang	3.886.550,00	
31	Pendidikan Suspajemen	1 Orang	3.817.000,00	
32	Pendidikan Setukpa	1 Orang	3.642.813,00	
33	Pendidikan Setukba	1 Orang	3.390.143,00	
34	Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	3.612.758,00	
35	Dikbangspes Bintara Matra Udara	1 Orang	3.027.750,00	
36	Dikbangspes Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.933.208,00	
37	Seleksi Dikbangspes Perwira Matra Udara	1 Orang	813.120,00	
38	Seleksi Dikbangspes Ba/Ta Matra Udara	1 Orang	699.920,00	
39	Koptar Pria	1 Orang	5.338.266,00	
40	Koptar Wanita	1 Orang	5.338.266,00	
41	Prajurit Taruna Pria	1 Orang	7.300.906,00	
42	Prajurit Taruna Wanita	1 Orang	7.300.906,00	
	Perkara Hukum Perseorangan			
43	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 1	1 Perkara	9.115.000,00	
44	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 2	1 Perkara	9.620.000,00	
45	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 3	1 Perkara	10.395.000,00	
46	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 4	1 Perkara	9.195.000,00	
47	Penyidikan Perkara Pidana Prajurit Rayon 5	1 Perkara	23.000.000,00	
48	Penyelidikan Kronwal Perkara Pidana Rayon 1	1 Perkara	6.242.000,00	
49	Penyelidikan Kronwal Perkara Pidana Rayon 2	1 Perkara	6.642.000,00	
50	Penyelidikan Kronwal Perkara Pidana Rayon 3	1 Perkara	6.902.000,00	
51	Penyelidikan Kronwal Perkara Pidana Rayon 4	1 Perkara	6.357.000,00	
52	Penyelidikan Kronwal Perkara Pidana Rayon 5	1 Perkara	13.917.000,00	
53	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 1	1 Perkara	2.315.000,00	
54	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 2	1 Perkara	2.480.000,00	
55	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 3	1 Perkara	2.585.000,00	
56	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 4	1 Perkara	2.355.000,00	
57	Penyidikan Perkara Pelanggaran Prajurit Rayon 5	1 Perkara	5.700.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	58 Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 1	1 Perkara	49.850.00	
	59 Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 2	1 Perkara	52.000.00	
	60 Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 3	1 Perkara	55.000.00	
	61 Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 4	1 Perkara	50.000.00	
	62 Pengurusan Tabanan Sementara Rayon 5	1 Perkara	65.000.00	
	63 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 1	1 Perkara	6.739.000.00	
	64 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 2	1 Perkara	7.224.000.00	
	65 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I Rayon 3	1 Perkara	7.559.000.00	
	66 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 4	1 Perkara	6.904.000.00	
	67 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. I Rayon 5	1 Perkara	16.720.000.00	
	68 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK Banding	1 Perkara	2.554.000.00	
	69 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK Kasasi	1 Perkara	2.564.000.00	
	70 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer TK. PK	1 Perkara	3.039.000.00	
	71 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 1	1 Perkara	13.902.000.00	
	72 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 2	1 Perkara	15.852.000.00	
	73 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 3	1 Perkara	17.195.000.00	
	74 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 4	1 Perkara	14.460.000.00	
	75 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I Rayon 5	1 Perkara	54.302.000.00	
	76 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk Banding	1 Perkara	4.681.000.00	
	77 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk Kasasi	1 Perkara	3.608.000.00	
	78 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Perkara	6.550.000.00	
	79 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 1	1 Perkara	30.027.000.00	
	80 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 2	1 Perkara	34.276.000.00	
	81 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 3	1 Perkara	37.310.000.00	
	82 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 4	1 Perkara	31.414.000.00	
	83 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat TK. I Rayon 5	1 Perkara	124.091.000.00	
	84 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 1	1 Perkara	8.716.000.00	
	85 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 2	1 Perkara	9.485.000.00	
	86 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 3	1 Perkara	10.021.000.00	
	87 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 4	1 Perkara	8.932.000.00	
	88 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding TK. Banding Rayon 5	1 Perkara	25.638.000.00	
	89 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	14.576.000.00	
	90 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	15.965.000.00	
	91 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	17.003.000.00	
	92 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	15.580.000.00	
	93 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	41.291.000.00	
	94 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	12.357.000.00	
	95 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	13.108.000.00	
	96 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	13.757.000.00	
	97 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	12.747.000.00	
	98 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	29.603.000.00	
	99 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 1	1 Perkara	27.906.000.00	
	100 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 2	1 Perkara	32.554.000.00	
	101 Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I Rayon 3	1 Perkara	35.856.000.00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pertahanan (012)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Beasiswa	Keterangan
1	2	3	4	5
102	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Gugat Tk. 1 Rayon 4	1 Perkara	29.238.000,00	
103	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Gugat Tk. 1 Rayon 5	1 Perkara	131.476.000,00	
104	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 1	1 Perkara	10.114.000,00	
105	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 2	1 Perkara	13.036.000,00	
106	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 3	1 Perkara	13.416.000,00	
107	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 4	1 Perkara	10.643.000,00	
108	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding Rayon 5	1 Perkara	52.535.000,00	
109	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 1	1 Perkara	15.285.000,00	
110	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 2	1 Perkara	17.445.000,00	
111	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 3	1 Perkara	19.035.000,00	
112	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 4	1 Perkara	16.515.000,00	
113	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi Rayon 5	1 Perkara	58.816.000,00	
114	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 1	1 Perkara	15.510.000,00	
115	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 2	1 Perkara	18.590.000,00	
116	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 3	1 Perkara	20.790.000,00	
117	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 4	1 Perkara	16.390.000,00	
118	Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK Rayon 5	1 Perkara	83.150.000,00	
119	Pendapat dan Saran Hukum (PSH)	1 Perkara	926.000,00	
120	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 1	1 Perkara	10.590.000,00	
121	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 2	1 Perkara	11.329.000,00	
122	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 3	1 Perkara	12.158.000,00	
123	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 4	1 Perkara	12.532.000,00	
124	Bantuan Hukum (Non Litigasi) Rayon 5	1 Perkara	44.711.000,00	
125	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 1	1 Perkara	12.115.000,00	
126	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 2	1 Perkara	12.920.000,00	
127	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 3	1 Perkara	13.395.000,00	
128	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 4	1 Perkara	12.495.000,00	
129	Penyidikan Perkara Pidana Berat Prajurit Rayon 5	1 Perkara	26.700.000,00	
130	Pengurusan Tahapan Hukuman Disiplin Rayon 1	1 Perkara	116.761,00	
131	Pengurusan Tahapan Hukuman Disiplin Rayon 2	1 Perkara	137.238,00	
132	Pengurusan Tahapan Hukuman Disiplin Rayon 3	1 Perkara	140.238,00	
133	Pengurusan Tahapan Hukuman Disiplin Rayon 4	1 Perkara	143.761,00	
134	Pengurusan Tahapan Hukuman Disiplin Rayon 5	1 Perkara	167.285,00	
135	Pengurusan Tahapan Dalam Proses Penuntutan Rayon 1	1 Perkara	46.520,00	
136	Pengurusan Tahapan Dalam Proses Penuntutan Rayon 2	1 Perkara	48.810,00	
137	Pengurusan Tahapan Dalam Proses Penuntutan Rayon 3	1 Perkara	51.844,00	
138	Pengurusan Tahapan Dalam Proses Penuntutan Rayon 4	1 Perkara	46.103,00	
139	Pengurusan Tahapan Dalam Proses Penuntutan Rayon 5	1 Perkara	60.931,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
015.01	Sekretariat Jenderal			
	Peraturan Lainnya			
	1. Regulasi Proses Keuangan	1 Peraturan	7.075.000,00	
015.03	Ditjen Anggaran			
	Pengelolaan Keuangan Negara			
	1. Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)	1 Laporan	80.523.000,00	
	Perencanaan dan Penganggaran			
	2. Pagu Indikatif	1 Dokumen	225.130.000,00	
	3. Pagu Anggaran	1 Dokumen	225.130.000,00	
	4. Pagu Alokasi	1 Dokumen	225.130.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	b. Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA)	1 Orang	2.102.000,00	
015.04	Ditjen Pajak			
	Koordinasi			
	1. Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional	1 Kegiatan	19.316.000,00	
015.05	Ditjen Bea dan Cukai			
	Pemanfaatan dan Evaluasi serta Pelaporan			
	1. Serifikasi AEO/ MITA	1 Rekomendasi	19.467.000,00	
	Pemantauan Perkara			
	2. Putusan Pemantauan Perkara	1 Perkara	1.328.000,00	
	Operasi Bidang Keamanan			
	3. Pemberantasan Narkotika	1 Operasi	95.507.000,00	
	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan			
	4. Analisis Targeting	1 Laporan	47.890.500,00	
015.06	Ditjen Perimbangan Keuangan			
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	1. Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	1 Orang	1.736.000,00	
015.07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko			
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan			
	1. Bulke Outrecht dalam jangka Pendalaman Pasar SUN	1 Kegiatan	50.246.000,00	
	2. Penerbitan Surat Utang Negara	1 Dokumen	10.350.000,00	
	3. Peninjauan dan Dokumen Hukum Transaksi SUN	1 Dokumen	6.240.000,00	
015.08	Ditjen Perbendaharaan			
	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan			
	1. Revisi Belanja Pemerintah	1 Dokumen	190.681.600,00	
	2. Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1 Dokumen	15.450.000,00	
	Pengelolaan Keuangan Negara			
	3. Laporan Keuangan BUN	1 Laporan	47.184.000,00	
	4. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	1 Laporan	217.116.000,00	
015.09	Ditjen Kekayaan Negara			
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			
	1. Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)	1 Kajian	330.846.000,00	
	2. Rekomendasi Nilai BMN yang Diastutuskan	1 Rekomendasi Kebijakan	314.485.000,00	
	Perencanaan dan Penganggaran			
	3. Rencana Kelulusan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga	1 Dokumen	1.079.000,00	
	Pengelolaan Keuangan Negara			
	4. LK BA BUN Transaksi Keuangan (999.99)	1 Laporan	57.505.000,00	
	5. LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)	1 Laporan	45.290.000,00	
	6. Laporan Barang Milik Negara	1 Laporan	43.745.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
020.04	Ditjen Minyak dan Gas Bumi			
	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
1	Evaluasi Pelaporan Data Cadangan Migas	1 Rekomendasi Kebijakan	217.261.000,00	
2	Koordinasi dan Evaluasi usulan dan/atau revisi Harga Jual Gas Bumi Hilir untuk penyediaan tenaga listrik dan industri	1 Rekomendasi Kebijakan	818.801.000,00	
3	Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.012.649.000,00	
4	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	1 Rekomendasi Kebijakan	485.582.000,00	
	Perizinan Produk			
5	Pengawasan Ekspor Minyak dan Gas Bumi Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Pengawasan Pergerakan Data Eksplorasi Hulu Migas	1 Produk	228.453.000,00	
6	Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas	1 Produk	28.431.000,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
7	Penyediaan RSM dan RSKNN untuk Kegiatan Usaha Migas	1 NSPK	186.506.000,00	
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			
8	Fasilitasi dan Pembinaan Bidang Operasi	1 Badan Usaha	9.353.000,00	
9	Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	1 Badan Usaha	129.594.000,00	
10	Pengawasan Penerapan Standardisasi Teknis pada Kegiatan	1 Badan Usaha	591.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Produk			
11	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Transmisi Pipa Gas	1 Produk	300.000.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan	1 Badan Usaha	9.140.000,00	
13	Pembinaan dan Pengawasan Teknik dan Lingkungan Minyak	1 Badan Usaha	1.067.000,00	
14	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Migas	1 Badan Usaha	250.000,00	
15	Pembinaan dan Pengawasan Program Minyak dan Gas Bumi	1 Badan Usaha	2.000.000,00	
16	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Migas	1 Badan Usaha	1.250.000,00	
020.05	Ditjen Ketenagalistrikan			
	Perizinan Lembaga			
1	Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk SPKLU dan	1 Badan Usaha	112.926.000,00	
2	Perizinan di Bidang Usaha Jasa Pemangaj Tenaga Listrik	1 Badan Usaha	9.857.000,00	
3	Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan	1 Badan Usaha	57.530.000,00	
	Sertifikasi Produk			
4	Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik	1 Sertifikat	50.000,00	
	Akreditasi Lembaga			
5	Akreditasi Lembaga Sertifikasi Ketenagalistrikan	1 Lembaga	33.782.000,00	
	Sertifikasi Lembaga			
6	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Pemangaj Tenaga Listrik	1 Badan Usaha	651.000,00	
	Perkara Hukum Persesorangan			
7	Fasilitasi Penyediaan dan Penyidikan Bidang	1 Perkara	304.394.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Produk			
8	Inspeksi Instalasi Ketenagalistrikan	1 Produk	29.379.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
9	Pengawasan dan Pengaturan Usaha Penyediaan Tenaga	1 Badan Usaha	60.316.000,00	
10	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga atau Badan Usaha	1 Badan Usaha	113.333.000,00	
020.06	Ditjen Mineral dan Batubara			
	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
1	Rekomendasi Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan Batubara	1 Rekomendasi Kebijakan	1.357.531.000,00	
2	Rekomendasi Kebijakan Pengusahaan Pertambangan Mineral	1 Rekomendasi Kebijakan	1.290.140.000,00	
020.07	Dewan Energi Nasional			
	Data dan Informasi Publik			
1	Outlook Energi Indonesia	1 Layanan	365.903.000,00	
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM			
	Akreditasi Lembaga			
1	Akreditasi Lembaga Diklat Sektor ESDM	1 Lembaga	42.043.000,00	
	Promosi			
2	Pengelolaan Pameran dan Promosi PEP Bandung	1 Promosi	326.746.000,00	
	Pelayanan Publik Lainnya			
3	Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tridharma	1 Layanan	1.522.987.000,00	
4	Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Tri Dharma	1 Layanan	300.085.000,00	
5	Aktualisasi Dosen PEP Bandung	1 Layanan	301.037.000,00	
6	Evaluasi Pelatihan PPSDM Migas	1 Layanan	337.519.000,00	
7	Pengelolaan Sarana dan prasarana pengembangan SDM	1 Layanan	1.493.856.000,00	
8	Pengelolaan Sertifikasi dan Akreditasi PPSDM Migas	1 Layanan	1.494.733.000,00	
	Data dan Informasi Publik			
9	Publikasi Jurnal dan Buletin PEM Akamigas	1 Layanan	364.046.000,00	
	Kerjasama			
10	Kerjasama PPSDM MIGAS	1 Kesepakatan	3.334.000,00	
11	Kerjasama PPSDM Geominerba	1 Kesepakatan	4.737.000,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
12	NSPK PPSDM MIGAS	1 NSPK	2.277.000,00	
13	NSPK PPSDM Geominerba	1 NSPK	10.909.000,00	
14	NSPK PPSDM KEHTKE	1 NSPK	23.551.000,00	
15	NSPK H2HBT	1 NSPK	49.000.000,00	
	Pelatihan Bidang Industri			
16	Pengelolaan Sarana dan Prasarana PPSDM Geominerba	1 Kegiatan	200.000.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Beantan	Keterangan
1	2	3	4	5
020.13	Badan Geologi			
	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
	1 Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi	1 Rekomendasi	215.450.000,00	
	2 Usulan Wilayah Pertambangan Saltbura	1 Rekomendasi	-12.833.000,00	
	3 Usulan Wilayah Pertambangan Mineral	1 Rekomendasi	-11.042.000,00	
	4 Dokumen Evaluasi Sumber Daya Mineral	1 Rekomendasi	1.654.598.000,00	
020.14	BPH Migas			
	Penetapan lainnya			
	1 Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1 Surat Keputusan	1.453.104.000,00	
	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
	2 Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	1 Rekomendasi Kebijakan	2.310.598.000,00	
	3 Dukungan Percepatan Pembangunan Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi (kumulatif)	1 Rekomendasi Kebijakan	1.754.020.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Produk			
	4 Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1 Produk	6.357.901.000,00	
	5 Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBNP	1 Produk	4.225.318.000,00	
	6 Pengawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian JBT	1 Produk	6.853.500.000,00	
020.15	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi			
	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
	1 Pembinaan Program bidang Aneka EBT	1 Rekomendasi Kebijakan	456.071.000,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	2 Rancangan Standar dan Pemula Bidang Konservasi Energi	1 NSPK	508.157.000,00	
	3 Rancangan dan Percepatan Standar Bidang Aneka EBT	1 NSPK	205.101.000,00	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	4 Fasilitasi Pembangunan PLT Aneka EBT	1 Lembaga	399.580.000,00	
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			
	5 Investasi Bidang Aneka EBT	1 Badan Usaha	391.597.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Produk			
	6 Pengawasan Produk di Bidang Konservasi Energi	1 Produk	381.043.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
	7 Manajemen Energi Lembaga	1 Lembaga	1.470.625.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			
	8 Monitoring dan Evaluasi K3 dan Lingkungan Biornergi	1 Badan Usaha	268.425.000,00	
	9 Monitoring PLT Aneka EBT	1 Badan Usaha	350.937.000,00	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
	10 Tatalak Lanyai Hasil Pemeriksaan Pembangunan Infrastruktur BBTKE	1 Laporan	971.579.000,00	
020.16	Badan Pengelola Migas Aceh			
	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
	1 Pembahasan Usulan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi	1 Rekomendasi Kebijakan	10.067.000,00	
	2 Rekomendasi kepada pemerintah dalam penyediaan wilayah kerja	1 Rekomendasi Kebijakan	58.000.000,00	
	3 Rekomendasi terhadap usulan pengembangan lapangan	1 Rekomendasi Kebijakan	47.222.000,00	
	4 Persetujuan Otomatisasi untuk pengeluaran IAPRI	1 Rekomendasi Kebijakan	4.354.000,00	
	5 Persetujuan AFE Closed Out	1 Rekomendasi Kebijakan	42.948.000,00	
	6 Pengendalian Pengelolaan Aset KKKS (Kelepuhan Dakangan Bisnis)	1 Rekomendasi Kebijakan	70.000.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			
	7 Optimalisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi serta	1 Badan Usaha	41.689.000,00	
	8 Pengawasan Produksi dan Lifting (Kelepuhan Operasi)	1 Badan Usaha	12.896.000,00	
	9 Pengawasan Pemboran	1 Badan Usaha	11.049.000,00	
	10 Persetujuan Kemitatan Program Kerja Eksplorasi	1 Badan Usaha	30.000.000,00	
	11 Evaluasi Monitoring POB	1 Badan Usaha	18.179.000,00	
	12 Manajemen ASR KKKS	1 Badan Usaha	41.579.000,00	
	13 Manajemen Akuntansi KKKS	1 Badan Usaha	61.965.000,00	
	14 Manajemen Perencanaan KKKS	1 Badan Usaha	206.899.000,00	
	15 Monetisasi Minyak dan Gas Bumi	1 Badan Usaha	29.420.000,00	
	16 Pemeriksaan Keuangan KKKS Eksplorasi/ Eksploitasi	1 Badan Usaha	187.402.000,00	
	17 Pengendalian Operasional Penunjang	1 Badan Usaha	12.095.000,00	
	18 Pengendalian Pengelolaan Aset KKKS (Kelepuhan Keuangan)	1 Badan Usaha	46.484.000,00	
	19 Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran KKKS	1 Badan Usaha	12.623.000,00	
	20 Pengawasan Pemeliharaan Fasilitas Produksi	1 Badan Usaha	28.126.000,00	
	21 Pengendalian Fasilitas Produksi	1 Badan Usaha	22.049.000,00	
	22 Persetujuan Pengalokasian Pekerjaan atas PIS	1 Badan Usaha	60.512.000,00	
	23 Manajemen Health, Safety, Environment KKKS dan Internal	1 Badan Usaha	17.280.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022)

Idaman rupiah

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
022.01	Sekretariat Jenderal			
	Kesepakatan Bersama			
	1 Kesepakatan Bersama	1 Perjanjian	484.600.000,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	1 NSPK Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	1 NSPK	287.680.000,00	
	2 NSPK Bidang Investigasi Keselamatan Transportasi	1 NSPK	167.466.000,00	
	3 NSPK Bidang Teknologi Informasi	1 NSPK	844.179.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Layanan			
	1 Investigasi Kecelakaan Transportasi	1 Layanan	7.775.227.000,00	
	2 Monitoring dan Evaluasi Hasil Investigasi	1 Layanan	1.303.227.000,00	
	3 Accident Review Forum	1 Layanan	201.227.000,00	
	Perkara Hukum Perseorangan			
	1 Perkara Hukum Peroris	1 Perkara	89.134.000,00	
	Perkara Hukum Badan Usaha			
	1 Perkara Hukum Perusahaan	1 Perkara	1.12.794.000,00	
	Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
	1 Kebijakan Tata Kelola Energi di Sektor Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	391.075.000,00	
	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			
	1 Kebijakan Tata Kelola Lingkungan Hidup Sektor Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	1.075.432.000,00	
	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik			
	1 Kebijakan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	525.801.000,00	
	Kebijakan Bidang Ketahanan Bencana dan perubahan iklim			
	1 Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Sektor Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	577.301.000,00	
	Forum			
	1 Forum Koordinasi Sektor Transportasi	1 Forum	65.000.000,00	
	Data dan Informasi Publik			
	1 Data dan Informasi Sektor Transportasi	1 Layanan	4.410.911.000,00	
	Komunikasi Publik			
	1 Komunikasi Publik Eksternal Kementerian Perhubungan	1 Layanan	328.056.000,00	
	2 Komunikasi Publik Internal Kementerian Perhubungan	1 Layanan	1.858.038.000,00	
	3 Komunikasi Simpatik	1 Layanan	3.154.349.000,00	
	4 Komunikasi Tematik	1 Layanan	12.935.743.000,00	
	Kerjasama			
	1 Sidang Internasional	1 Layanan	10.640.133.000,00	
	2 Efektivitas Kinerja Perwakilan Kementerian Perhubungan di Luar Negeri	1 Kegiatan	151.412.000,00	
	3 Kerjasama Investasi Keselamatan Transportasi	1 Kesepakatan	356.318.500,00	
022.03	Ditjen Perhubungan Darat			
	Bus Bantuan			
	1 Bus Bantuan	1 Unit	600.000.000,00	
	Halte Sungai			
	1 Halte Sungai	1 Instalasi	3.500.000.000,00	
	Zona Selamat Sekolah			
	1 zona selamat sekolah	1 unit	500.000.000,00	
	Rambu Sungai dan Deras			
	1 Rambu Sungai dan Deras	1 unit	20.000.000,00	
	Bangka SUT dan SRUT			
	1 Bangko SUT dan SRUT	1 Set	120.000,00	
	Bukti Lulus Uji Berkala			
	1 Bukti Lulus Uji Berkala	1 Set	22.000,00	
022.04	Ditjen Perhubungan Laut			
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	1 Serifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat	1 NSPK	1.044.354.000,00	
	2 Kurikulum, Silabi, Modul dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi	1 NSPK	506.915.063,00	
022.11	Badan Kebijakan Transportasi			
	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			
	Rekomendasi Transportasi Arus moda Jabodetabek	1 Rekomendasi Kebijakan	863.072.000,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	1 NSPK Angkutan Perumpong di Jabodetabek	1 Pedoman	2.000.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perhubungan (022)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pemantauan produk			
	1 Laporan Monitoring Prasarana Transportasi di Jabodetabek	1 Laporan	1.234.937.000,00	
	2 Laporan Monitoring Sarana Transportasi di Jabodetabek	1 Laporan	320.000.000,00	
	Pelayanan Publik Lainnya			
	1 Intelligent Transport Systems (ITS) Jabodetabek	1 Layanan	6.163.838.000,00	
022.12	Badan Pengembangan SDM Perhubungan			
	Standarisasi Lembaga			
	1 Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Di Jalur Transportasi Darat	1 Lembaga	202.147.417,00	
	2 Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Di Jalur Transportasi Laut	1 Lembaga	185.825.300,00	
	3 Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Di Jalur Transportasi Udara	1 Lembaga	75.897.077,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
	1 SKKNI Transportasi LAGI	1 NSPK	75.736.000,00	
	2 Kurikulum dan Silabus Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	1 NSPK	480.318.000,00	
	3 Kurikulum dan Silabus Berbasis Kompetensi Transportasi Udara	1 NSPK	210.745.000,00	
	4 Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	1 NSPK	294.769.000,00	
	5 Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut	1 NSPK	540.947.000,00	
	6 Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara	1 NSPK	250.001.000,00	
	7 Sertifikasi, Standarisasi Akreditasi dan Manajemen Mutu Di Jalur	1 NSPK	75.327.000,00	
	8 Kurikulum, Silabi, Modul dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi	1 NSPK	277.908.000,00	
	9 Standard Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1 NSPK	194.335.000,00	
	10 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Darat	1 NSPK	104.327.438,00	
	11 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	1 NSPK	167.296.351,00	
	12 Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara	1 NSPK	140.054.820,00	
	Data dan Informasi Publik			
	1 Sistem Data dan Informasi	1 Layanan	598.190.000,00	
	Peraturan lainnya			
	1 Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan	1 Peraturan	326.236.000,00	
	Kerja sama			
	1 Kejasama dan Kerjasama Antar Instansi dan Lembaga	1 Kesepakatan	162.960.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

[dalam Rp,ribu]

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
023.15	Direktorat Jenderal Kebudayaan			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1 Masyarakat Yang Mengapresiasi Film dan Musik Indonesia	1 Orang	1.675.000,00	
	2 Even Jala dan Musik yang dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Paket	21.708.205.000,00	
	3 Karya Perfilman dan Musik Indonesia	1 Paket	1.570.115.000,00	
	4 NSPK dan Dukungan Warisan Budaya yang Berusun dan Dilatih	1 NSPK	400.000.000,00	
	5 Informasi Pelindungan Warisan Budaya yang Disebarkan	1 Layanan	830.000.000,00	
	6 Warisan Budaya yang Ditetapkan	1 Layanan	27.500.000,00	
	7 Warisan Budaya yang Dilindungi	1 Unit	634.800.000,00	
	8 Event Diplomasi Cagar Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Kegiatan	27.521.845.000,00	
	9 Even Frontis Bidang Kebudayaan	1 Kegiatan	90.000.000.000,00	
	10 Sarana Pendidikan Yang Mengelenggarakan Pembekuan Nilai Budaya Dan Objek Pemajuan Kebudayaan	1 Lembaga	50.000.000,00	
	11 Fasilitasi Bidang Kebudayaan	1 Kelompok	357.861.000,00	
	12 Desa Pemajuan Kebudayaan	1 Desa	250.000.000,00	
	13 NSPK Bidang Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	1 NSPK	483.320.000,00	
	14 SKKN Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan	1 NSPK	550.000.000,00	
	15 Lembaga Kebudayaan yang Dibina	1 Lembaga	17.213.000,00	
	16 Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya Yang	1 Orang	7.741.000,00	
	17 Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya	1 Orang	3.016.000,00	
	18 Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi	1 Orang	3.365.000,00	
023.18	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi			
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	1 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	1 Orang	4.383.381,00	
	2 Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	1 Orang	6.257.274,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kesehatan (024)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
024.01	Sekretariat Jenderal			
024.05	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
	Pelayanan Publik Lainnya			
	1 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan	1 Layanan	660.000,00	
	2 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di bandar udara	1 Layanan	890.000,00	
	3 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di PLBN	1 Layanan	890.000,00	
	4 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus	1 Layanan	1.555.000,00	
	5 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di Bandar Udara Soekarno Hatta Terminal Internasional	1 Layanan	2.420.000,00	
	6 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan kategori I	1 Layanan	940.000,00	
	7 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit DBD	1 Layanan	1.204.000,00	
	8 Layanan survei faktor risiko penyakit pes	1 Layanan	2.825.000,00	
	9 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	1 Layanan	479.000,00	
	10 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	1 Layanan	1.379.000,00	
	11 Layanan survei faktor risiko penyakit DRD (HS)	1 Layanan	360.000,00	
	12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria (HS)	1 Layanan	1.720.000,00	
	13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare	1 Layanan	360.000,00	
	14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS (HS)	1 Layanan	1.314.000,00	
	15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB (HS)	1 Layanan	5.455.000,00	
	16 Layanan Kegawatdaruratan dan rujukan kategori II (HS)	1 Layanan	800.000,00	
	17 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan (HS)	1 Layanan	660.000,00	
	18 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	1 Layanan	970.000,00	
	19 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria kategori 2	1 Layanan	2.020.000,00	
	20 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD kategori I (HS)	1 Layanan	360.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Agama (025)

Salinan rencana

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
025.02	Inspektorat Jenderal Layanan Audit Internal 1 Layanan Audit Internal	1 Dokumen	51.515.000,00	
025.03	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bantuan Peralatan/Sarana 1 Kitab Suci Agama Islam dan Sarana Peribadatan Agama Islam yang Disediakan	1 Unit	81.000,00	
025.03	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 1 Dosen yang Tersertifikasi	1 Orang	3.250.000,00	
025.05	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 1 Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang Tersertifikasi	1 Orang	3.250.000,00	
025.06	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik 1 Dosen PTK Katolik yang tersertifikasi	1 Orang	3.250.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Ketenagakerjaan (026)

idalam: rupiah;

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
026.01	Sekretariat Jenderal			
	Koordinasi			
	1 Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan	1 Kesepakatan	696.510.000,00	
	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM			
	1 Analisa Pasar Kerja	1 Orang	14.125,00	
026.04	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			
	Pelayanan Publik kepada masyarakat			
	1 Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1 Dokumen	564.120.000,00	
	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik			
	1 Rekomendasi Kebijakan Publik	1 Orang	7.141.188,00	
	Kerja sama			
	1 Jejaring Peningkatan Produktivitas	1 Dokumen	900.000.000,00	
	Forum			
	1 Forum Kerjasama Lintas Sektor	1 Kesepakatan	923.414.750,00	
026.13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas			
	Pelayanan Publik kepada masyarakat			
	1 Jejaring Kemahiran Pasar Kerja	1 Kegiatan	5.991.950,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Sosial (027)

(dalam rupiah)

Kode	Urutan	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
027.01	Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi			
	1 Mahasiswa Program Sarjana Terapan	1 Orang	1.851.052,00	
	2 Mahasiswa Program Magister Terapan	1 Orang	17.405.100,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (029)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Estimasi	Keterangan
1	2	3	4	5
029.01	Sekretariat Jenderal Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam			
	1 Rancangan Kebijakan Strategis Bidang LH	1 Rekomendasi Kebijakan	202.791.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	1 NSPK Ketechnikan Bidang LHK dan Penerapannya di Sarke/CPT/KSH	1 NSPK	884.724.000,00	
029.05	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kebijakan Bidang Kehutanan			
	1 Kebijakan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang Dikembangkan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000,00	
029.06	Direktorat Jenderal Teknologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Data dan Informasi Publik			
	1 Informasi dan dokumentasi pengukuran dan penggunaan kawasan hutan	1 Layanan	500.000.000,00	
	2 Data dan Peta Kawasan Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Dokumen	475.000.000,00	
029.014	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem			
	1 Rehabilitasi Ekosistem Mangrove	1 Hektar	24.053.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
032.03	Ditjen Perikanan Tangkap			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	1 Rekomendasi bahan standar, teknis dan desain sarana penangkapan ikan yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	166.667.000,00	
	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan			
	2 Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun	1 Rekomendasi Kebijakan	1.066.667.000,00	
	3 Rekomendasi kebijakan, pengelolaan permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000,00	
	4 Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	1 Produk	2.323.000,00	
	5 Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi	1 Produk	250.000.000,00	
	6 Bantuan sarana penangkapan ikan yang dipantau pemelabuatannya	1 Laporan	10.205.000,00	
	7 Penerbitan daerah yang difasilitasi dan dibina penerbitan dokumen kapal perikanan	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000,00	
	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			
	8 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Pericut yang dikelola dan operasional sesuai standar	1 Lembaga	7.720.928.800,00	
	9 Pelabuhan Perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya	1 Unit	230.000.000,00	
	Pengelolaan Perikanan dan Kenelayanan			
	10 Ikan beresaka sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	1 Produk	299.000,00	
	11 Nelayan yang difasilitasi perendangannya	1 Orang	809.000,00	
	12 Provinsi yang difasilitasi tata kelola perikanan tangkap	1 Provinsi	391.800.000,00	
032.04	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			
	Bantuan Hewan			
	1 Calon induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	36.514,00	
	2 Calon induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	55.201,00	
	3 Calon induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	103.000,00	
	4 Calon induk Unggul Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	158.459,00	
	5 Calon induk Unggul Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	335.243,00	
	6 Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	332,00	
	7 Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	50,00	
	8 Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	238,00	
	9 Benih Kepiting yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	691,00	
	10 Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	1 Ekor	5.680,00	
	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			
	11 Sampel Residu Layanan UPT	1 Sampel	959.042,00	
	12 Sampel Kualitas Air Layanan UPT	1 Sampel	203.061,00	
	13 Sampel Patologi Layanan UPT	1 Sampel	377.146,00	
	14 Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	1 Sampel	535.610,00	
	15 Sampel Biologi Molekuler Layanan UPT	1 Sampel	951.677,00	
	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			
	16 Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba (AMR) Struveter	1 Sampel	887.853,00	
	17 Sampel Nutrisi Pakan	1 Sampel	514.997,00	
	Penyidikan dan Pengujian Penyakit			
	18 Sampel Obat Ikan	1 Sampel	620.072,00	
	19 Sampel Mutu Pakan	1 Sampel	951.985,00	
032.05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
	Penanganan Perkara			
	1 Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi	1 Perkara	31.300.000,00	
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan			
	2 Nelayan yang difasilitasi pemulagannya	1 Orang	3.000.000,00	
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan			
	3 Sengketa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditangani	1 Perkara	610.000.000,00	
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan			
	4 Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	1 kegiatan	961.890.000,00	
032.07	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut			
	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			
	1 Dokumen NSPK Jasa Kelautan	1 NSPK	100.000.000,00	
032.13	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			
	Karantina Ikan			
	1 Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (EPK)	1 Rekomendasi Kebijakan	66.667.000,00	
	2 Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri	1 Rekomendasi Kebijakan	50.000.000,00	
	3 Rekomendasi Kebijakan mitigasi resiko lalu lintas hasil perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pengendalian Mutu			
4	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1 Rekomendasi Kebijakan	35.715.000,00	
5	NSPK Sistem Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan	1 NSPK	100.000.000,00	
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan			
6	NSPK standarisasi sistem dan kepatuhan Perkarantinaan hasil dan mutu hasil perikanan	1 NSPK	200.000.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
035.01	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			
	1 Rekomendasi Kebijakan di Bidang Moneter dan Sektor Eksternal	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	2 Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektifitas Kebijakan Ekonomi	1 Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000,00	
	3 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Perekonomian Daerah dan Sektor Nirl	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	4 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Fiskal	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	5 Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000,00	
	6 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000,00	
	7 Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika Pasifik	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000.000,00	
	8 Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Amerika Pasifik	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	9 Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000,00	
	10 Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	11 Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Asia	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000.000,00	
	12 Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000,00	
	13 Rekomendasi Persiapan Forum Bilateral Eropa, Afrika dan Timur Tengah	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000,00	
	14 Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	150.000.000,00	
	15 Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000.000,00	
	16 Rekomendasi Kebijakan Implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM)	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	17 Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia pada Forum Internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	20.000.000,00	
	18 Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	19 Rekomendasi Percepatan Penyelesaian dan Implementasi Perundingan Perdagangan Internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000,00	
	20 Rekomendasi dalam Penguatan Kepemimpinan Indonesia dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Internasional	1 Rekomendasi Kebijakan	1.520.000.000,00	
	21 Rekomendasi Kebijakan Stabilitas Harga Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	22 Rekomendasi Kebijakan yang terkait Produksi, Cadangan, Distribusi dan Konsumsi Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	23 Rekomendasi Kebijakan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	24 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Industri	1 Rekomendasi Kebijakan	900.000.000,00	
	25 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000,00	
	26 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000,00	
	27 Rekomendasi Kebijakan Bidang Fasilitas Perdagangan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
	28 Rekomendasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)	1 Rekomendasi Kebijakan	4.000.000.000,00	
	29 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Agribisnis Perkelumatan	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000,00	
	30 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kemitraan Hulu Hilir Subsektor Hortikultura	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000,00	
	31 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000,00	
	32 Rekomendasi Kebijakan Bidang Percepatan Pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
	33 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemanfaatan Pembangunan	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
	34 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Air Fungsi Lahan Sawah dan Penetapan Lahan Sawah yang Diduduki	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
	35 Rekomendasi Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	1 Rekomendasi Kebijakan	200.000.000,00	
	36 Rekomendasi Kebijakan Keuangan Inklusif	1 Rekomendasi Kebijakan	4.500.000.000,00	
	37 Rekomendasi Kebijakan Keuangan Syariah	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
	38 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN Sektor Niaga dan Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	450.000.000,00	
	39 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Riset dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000,00	
	40 Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembudayaan BUMN Sektor Usaha dan Industri Manufaktur	1 Rekomendasi Kebijakan	350.000.000,00	
	41 Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
	42 Rekomendasi Kebijakan Bidang Riset dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Parawisata	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
	43 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Industri Informasi	1 Rekomendasi Kebijakan	700.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
44	Rekomendasi Kebijakan Bidang Restrukturisasi, Pengembangan, dan Pembiayaan EBCMN Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000,00	
45	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Petrokimia	1 Rekomendasi Kebijakan	300.000.000,00	
46	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketentaraan	1 Rekomendasi Kebijakan	500.000.000,00	
47	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Baru Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
48	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Baru Indonesia	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
49	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelangkaan Kebencanaan Untuk Pengembangan Wilayah	1 Rekomendasi Kebijakan	250.000.000,00	
50	Rekomendasi Implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi	1 Rekomendasi Kebijakan	15.000.000.000,00	
51	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia Mandiri	1 Rekomendasi Kebijakan	10.000.000.000,00	
52	Rekomendasi Kebijakan Kompilasi, Integrasi, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Penyelidikan Tumpang Tindih Perencanaan Ruang dalam Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta	1 Rekomendasi Kebijakan	5.000.000.000,00	
53	Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000,00	
54	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000,00	
55	Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	1 Rekomendasi Kebijakan	5.500.000.000,00	
56	Rekomendasi Kebijakan Dukungan Pengembangan Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Eksisting, Pembangunan yang Berbasis dan Perencanaan Infrastruktur Kedepan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.300.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (036) (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
036.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah 1 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemertan Pembangunan Wilayah Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan 2 Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan	364.521.000,00 500.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian BUMN (041)

jabatan: jdi/041

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
041.01	Kementerian BUMN			
	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan			
1	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Mineral dan Batubara	1 BUMN	650.000.000,00	
2	Rumusan Kebijakan penguatan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	1 BUMN	650.000.000,00	
3	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BUMN	1 BUMN	650.000.000,00	
4	Layanan Kinerja BUMN	1 Badan usaha	1.500.000.000,00	
5	Rumusan Kebijakan Penguatan Kapasitas BUMN	1 BUMN	650.000.000,00	
6	Rumusan Kebijakan Penetapan Dividen BUMN	1 Rekomendasi Kebijakan/Kasus	1.400.000.000,00	
7	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Industri Industri Pemanan dan Pupuk	1 Rekomendasi Kebijakan	1.500.000.000,00	
8	Rumusan kebijakan strategis terkait pemertasaan BUMN	1 BUMN	650.000.000,00	
9	Rumusan kebijakan penguatan daya saing BUMN Sektor Jasa Logistik	1 Rekomendasi Kebijakan	1.200.000.000,00	
	Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM			
	Dirikan dan Dekom atau Dewan BUMN Group yang ditetapkan sesuai ketentuan	1 Rekomendasi Kebijakan/Kasus	700.000.000,00	
	Layanan Bantuan Hukum Badan Usaha			
	Legal opinion atas pelaksanaan hukum korporasi BUMN	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000.000,00	
	Facilitasi dan Pembiayaan BUMN			
1	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Energi, Minyak dan Gas	1 BUMN	650.000.000,00	
2	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Mineral dan Batubara	1 Rekomendasi kebijakan	700.000.000,00	
3	Hasil pengembangan BUMN Sektor Industri Kesehatan	1 BUMN	650.000.000,00	
4	Hasil pengembangan BUMN sektor Sektor Jasa Keuangan	1 BUMN	650.000.000,00	
5	Hasil pengembangan BUMN Sektor Jasa Infrastruktur	1 BUMN	650.000.000,00	
6	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Asuransi dan Dana Pensiun	1 BUMN	650.000.000,00	
7	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Perkebunan dan Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000.000,00	
8	Hasil pengembangan BUMN sektor Industri Pangan dan Pupuk	1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000,00	
9	Hasil pengembangan BUMN sektor Jasa Telekomunikasi dan Media	1 Rekomendasi Kebijakan	350.000.000,00	
10	Hasil pengembangan BUMN Sektor Sektor Jasa Logistik	1 Rekomendasi Kebijakan	650.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak (047)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
047.01	Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Data dan Informasi Publik 1. Rincian Profil Hasil Pengolahan Data Pengawasan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Bantuan Masyarakat 2. Perempuan rentan yang mendapat bantuan spesifik 3. AMPK yang mendapat bantuan khusus anak Standarisasi Lembaga 4. Standarisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik dan Hukum	1 Dokumen 1 Orang 1 Orang 1 Lembaga	150.000,00 500.000,00 500.000,00 50.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (048)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
048.01	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan			
	1 Fasilitas Peningkatan Proses Bisnis Instansi Pemerintah Bidang Polhukam	1 Lembaga	117.073.000,00	
	2 Fasilitas Peningkatan Proses Bisnis Instansi Pemerintah Bidang Perencanaan, Kemitraan dan Investasi	1 Lembaga	108.363.000,00	
	3 Fasilitas peningkatan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1 Lembaga	90.613.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Intelijen Negara (OSD)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
OS0.01	Badan Intelijen Negara Pendidikan Tinggi 1 Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) 2 Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (SPIN)	1 Orang 1 Orang	309.300.000,00 104.667.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Siber dan Sandi Negara (051)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ujukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
051.01	Badan Siber dan Sandi Negara Facilitasi dan Pembinaan Lembaga 1. Facilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Pemerintah Pusat 2. Facilitasi dan Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Pembangunan Manusia	1 Lembaga 1 Lembaga	53.158.000,00 72.366.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Ketahanan Nasional (052)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
052.01	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam 1 Rumusan Kebijakan Direras Bidang Lingkungan Alam	1 Rekomendasi Kebijakan	266.472.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pusat Statistik (054)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
054.01	Badan Pusat Statistik			
	Data dan Informasi Publik			
	1 Publikasi/Laporan Indeks Pembangunan Manusia	1 Publikasi/Laporan	1 065 170 000,00	
	Layanan Pengawasan Internal			
	2 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah I	1 Dokumen	28 050 294,00	
	Layanan Pengawasan Internal			
	3 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	1 Dokumen	27 095 431,00	
	Layanan Pengawasan Internal			
	4 Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah III	1 Dokumen	28.621 054,00	
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	5 Deklar. Teknis Substansi	1 Orang	3.660 952,00	
	6 Deklar. Fungsional	1 Orang	3.316 250,00	
	7 Standardisasi dan Sertifikasi	1 Orang	3.670 476,00	
	Layanan Manajemen SDM Internal			
	8 Program DIII	1 Orang	5.904 727,00	
	9 Program DIV	1 Orang	5.714.499,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
056.01	Sekretariat Jenderal			
	Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Program dan Anggaran Serta Administrasi Kerja Sama			
1	Naskah Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1.119.144.000,00	
2	Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	524.841.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
1	PBT Redistribusi Tanah Kategori 1	1 Bidang	214.600,00	
2	PBT Redistribusi Tanah Kategori 2	1 Bidang	182.700,00	
3	PBT Redistribusi Tanah Kategori 3	1 Bidang	151.800,00	
4	PBT Redistribusi Tanah Kategori 4	1 Bidang	118.200,00	
5	PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	1 Bidang	85.500,00	
6	PBT Redistribusi Tanah Kategori 6	1 Bidang	231.500,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
7	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 1	1 Bidang	473.600,00	
8	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 2	1 Bidang	402.800,00	
9	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 3	1 Bidang	334.100,00	
10	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 4	1 Bidang	259.100,00	
11	PBT Konsolidasi Tanah Kategori 5	1 Bidang	195.100,00	
12	PBT PTSL Partisipasi Masyarakat dan ASN Kategori V	1 Bidang	131.200,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
13	PBT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	422.000,00	
14	PBT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	357.100,00	
15	PBT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	291.200,00	
16	PBT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	225.700,00	
17	PBT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	159.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
18	PBT PTSL Partisipasi Masyarakat dan Pihak Ketiga Kategori V	1 Bidang	203.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
19	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 1-10 Ha Kategori 1	1 Bidang	1.730.000,00	
20	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 1-10 Ha Kategori 2	1 Bidang	9.980.000,00	
21	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 1-10 Ha Kategori 3	1 Bidang	8.780.000,00	
22	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 1-10 Ha Kategori 4	1 Bidang	6.430.000,00	
23	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 1-10 Ha Kategori 5	1 Bidang	4.630.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
24	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 10-100 Ha Kategori 1	1 Bidang	32.450.000,00	
25	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 10-100 Ha Kategori 2	1 Bidang	28.250.000,00	
26	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 10-100 Ha Kategori 3	1 Bidang	24.170.000,00	
27	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 10-100 Ha Kategori 4	1 Bidang	19.730.000,00	
28	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 10-100 Ha Kategori 5	1 Bidang	15.410.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
29	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ha Kategori 1	1 Bidang	48.770.000,00	
30	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ha Kategori 2	1 Bidang	43.170.000,00	
31	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ha Kategori 3	1 Bidang	37.730.000,00	
32	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ha Kategori 4	1 Bidang	31.810.000,00	
33	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas 100-1000 Ha Kategori 5	1 Bidang	26.050.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
34	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dari 1000 Ha Kategori 1	1 Bidang	73.570.000,00	
35	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dari 1000 Ha Kategori 2	1 Bidang	64.170.000,00	
36	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dari 1000 Ha Kategori 3	1 Bidang	55.630.000,00	
37	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dari 1000 Ha Kategori 4	1 Bidang	46.010.000,00	
38	PBT HKH Redistribusi Ulayat Komunal Luas Lebih dari 1000 Ha Kategori 5	1 Bidang	37.690.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
39	PBT BMN Luas Kurang dari 25.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	1.173.000,00	
40	PBT BMN Luas Kurang dari 25.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	998.000,00	
41	PBT BMN Luas Kurang dari 25.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	828.000,00	
42	PBT BMN Luas Kurang dari 25.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	643.000,00	
43	PBT BMN Luas Kurang dari 25.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	463.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
44	PBT BMN Luas 25.000-100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	2.273.000,00	
45	PBT BMN Luas 25.000-100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	1.923.000,00	
46	PBT BMN Luas 25.000-100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	1.583.000,00	
47	PBT BMN Luas 25.000-100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	1.213.000,00	
48	PBT BMN Luas 25.000-100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	853.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
49	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 1	1 Bidang	6.200.000,00	
50	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 2	1 Bidang	5.131.000,00	
51	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 3	1 Bidang	4.481.000,00	
52	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 4	1 Bidang	3.556.000,00	
53	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	1 Bidang	2.656.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
54	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Jawa Bali	1 Hektar	437.400,00	
55	PBT PTSL Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	1 Hektar	230.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
56	SHAT PTSL ASN Kategori 1	1 Bidang	259.000,00	
57	SHAT PTSL ASN Kategori 2	1 Bidang	226.000,00	
58	SHAT PTSL ASN Kategori 3	1 Bidang	193.000,00	
59	SHAT PTSL ASN Kategori 4	1 Bidang	160.000,00	
60	SHAT PTSL ASN Kategori 5	1 Bidang	128.000,00	
61	SHAT PTSL ASN Kategori 6	1 Bidang	357.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
62	SHAT PTSL PM Kategori 1	1 Bidang	177.000,00	
63	SHAT PTSL PM Kategori 2	1 Bidang	156.000,00	
64	SHAT PTSL PM Kategori 3	1 Bidang	136.000,00	
65	SHAT PTSL PM Kategori 4	1 Bidang	114.000,00	
66	SHAT PTSL PM Kategori 5	1 Bidang	92.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
67	SHAT Non Sistematis Kategori 1	1 Bidang	292.000,00	
68	SHAT Non Sistematis Kategori 2	1 Bidang	254.000,00	
69	SHAT Non Sistematis Kategori 3	1 Bidang	217.000,00	
70	SHAT Non Sistematis Kategori 4	1 Bidang	176.000,00	
71	SHAT Non Sistematis Kategori 5	1 Bidang	136.000,00	
72	SHAT Non Sistematis Kategori 6	1 Bidang	379.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
73	SHAT Redistribusi Tanah	1 Bidang	14.000,00	
74	SHAT Konsolidasi Tanah	1 Bidang	14.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
75	SHAT BMK (s.d 25.000 m2) Kategori 1	1 Bidang	875.400,00	
76	SHAT BMK (s.d 25.000 m2) Kategori 2	1 Bidang	735.400,00	
77	SHAT BMK (s.d 25.000 m2) Kategori 3	1 Bidang	509.400,00	
78	SHAT BMK (s.d 25.000 m2) Kategori 4	1 Bidang	451.400,00	
79	SHAT BMK (s.d 25.000 m2) Kategori 5	1 Bidang	307.400,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
80	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 1	1 Bidang	1.703.400,00	
81	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 2	1 Bidang	1.495.900,00	
82	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 3	1 Bidang	1.206.900,00	
83	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 4	1 Bidang	807.400,00	
84	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	1 Bidang	586.400,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
85	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 1	1 Bidang	3.731.400,00	
86	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 2	1 Bidang	3.101.400,00	
87	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 3	1 Bidang	2.489.400,00	
88	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 4	1 Bidang	1.823.400,00	
89	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	1 Bidang	1.175.100,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
90	SK Redistribusi Tanah Kategori I	1 Bidang	302.000,00	
91	SK Redistribusi Tanah Kategori II	1 Bidang	261.000,00	
92	SK Redistribusi Tanah Kategori III	1 Bidang	229.000,00	
93	SK Redistribusi Tanah Kategori IV	1 Bidang	195.000,00	
94	SK Redistribusi Tanah Kategori V	1 Bidang	164.000,00	
95	SK Redistribusi Tanah Kategori VI	1 Bidang	423.500,00	
	Prasarana Pengembangan Kawasan			
96	Data dan Informasi P4T Kategori I	1 Bidang	114.000,00	
97	Data dan Informasi P4T Kategori II	1 Bidang	104.000,00	
98	Data dan Informasi P4T Kategori III	1 Bidang	95.000,00	
99	Data dan Informasi P4T Kategori IV	1 Bidang	85.000,00	
100	Data dan Informasi P4T Kategori V	1 Bidang	82.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Lembaga			
101	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori I (Materi Teknis)	1 Lembaga	129.551.000,00	
102	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori II (Materi Teknis)	1 Lembaga	118.487.000,00	
103	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori III (Materi Teknis)	1 Lembaga	115.818.000,00	
104	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori IV (Materi Teknis)	1 Lembaga	113.893.000,00	
105	Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V (Materi Teknis)	1 Lembaga	117.989.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
106	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori I	1 Bidang	529.780,00	
107	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori II	1 Bidang	457.480,00	
108	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori III	1 Bidang	423.120,00	
109	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori IV	1 Bidang	360.400,00	
110	Surat Keputusan Konsolidasi Tanah Kategori V	1 Bidang	353.500,00	
056.09	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan			
	Koordinasi			
1	Perita Acara Reuni/Ases Pelaksanaan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan	2.328.345.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (057)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
057.01	Perpustakaan Nasional			
	Sarana Bidang Pendidikan			
	1. Abn Media Babun Perpustakaan Terceak Media Kertas	1 Paket	10.220.000,00	
	2. Abn Media Babun Perpustakaan Formal Audio	1 Paket	10.170.000,00	
	3. Dokumen NSPK Pelatihan Kepustakawanan yang Disusun	1 NSPK	93.192.000,00	
	4. Dokumen NSPK Pembinaan Pustakawan yang disusun	1 NSPK	193.633.000,00	
	5. Naskah Ktntu yang Diadakan	1 Paket	20.712.000,00	
	6. Literatur Sekunder Yang Diterbitkan	1 Paket	61.930.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
059.03	Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika			
	Pelayanan Publik Lainnya			
1	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota wilayah Sumatera	1 Layanan	3.750.000,00	
2	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah Sumatera	1 Layanan	22.970.000,00	
3	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara wilayah Sumatera	1 Layanan	37.580.000,00	
4	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi laut/sungai wilayah Sumatera	1 Layanan	34.450.000,00	
5	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota wilayah Sumatera	1 Layanan	26.390.000,00	
6	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi darat wilayah Sumatera	1 Layanan	62.146.000,00	
7	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi laut/sungai wilayah Sumatera	1 Layanan	85.975.000,00	
8	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota wilayah Jawa	1 Layanan	7.775.000,00	
9	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah Jawa	1 Layanan	24.920.000,00	
10	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi laut/sungai wilayah Jawa	1 Layanan	28.900.000,00	
11	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota wilayah Jawa	1 Layanan	25.545.000,00	
12	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi darat wilayah Jawa	1 Layanan	90.615.000,00	
13	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi laut/sungai wilayah Jawa	1 Layanan	59.430.000,00	
14	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota wilayah Kalimantan	1 Layanan	5.908.000,00	
15	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah Kalimantan	1 Layanan	25.425.000,00	
16	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara wilayah Kalimantan	1 Layanan	34.255.000,00	
17	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi laut/sungai wilayah Kalimantan	1 Layanan	29.920.000,00	
18	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota wilayah Kalimantan	1 Layanan	24.476.000,00	
19	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi darat wilayah Kalimantan	1 Layanan	64.470.000,00	
20	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi udara wilayah Kalimantan	1 Layanan	69.910.000,00	
21	Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi laut/sungai wilayah Kalimantan	1 Layanan	63.320.000,00	
22	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota wilayah Sulawesi	1 Layanan	6.400.000,00	
23	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah Sulawesi	1 Layanan	25.690.000,00	
24	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara wilayah Sulawesi	1 Layanan	37.330.000,00	
25	Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi sungai/laut wilayah Sulawesi	1 Layanan	31.355.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	26 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota wilayah Sulawesi	1 Layanan	33.750.000,00	
	27 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi darat wilayah Sulawesi	1 Layanan	76.200.000,00	
	28 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi laut/sungai wilayah Sulawesi	1 Layanan	83.290.000,00	
	29 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota wilayah Papua	1 Layanan	8.100.000,00	
	30 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah Papua	1 Layanan	40.730.000,00	
	31 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara wilayah Papua	1 Layanan	58.678.000,00	
	32 Pemantauan pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi laut/sungai wilayah Papua	1 Layanan	49.200.000,00	
	33 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara/laut/sungai wilayah Papua	1 Layanan	61.471.000,00	
	34 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota wilayah Papua	1 Layanan	34.675.000,00	
	35 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi udara/darat wilayah Papua	1 Layanan	178.411.000,00	
	36 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio dalam kota wilayah kepulauan	1 Layanan	7.462.000,00	
	37 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat wilayah kepulauan	1 Layanan	25.425.000,00	
	38 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara wilayah kepulauan	1 Layanan	45.710.000,00	
	39 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi laut/sungai wilayah kepulauan	1 Layanan	27.258.000,00	
	40 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi udara/laut/sungai wilayah kepulauan	1 Layanan	66.813.000,00	
	41 Pemantauan, pengukuran dan penanganan gangguan frekuensi radio luar kota transportasi darat/laut wilayah kepulauan	1 Layanan	16.990.000,00	
	42 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika dalam kota wilayah kepulauan	1 Layanan	29.938.000,00	
	43 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi darat wilayah kepulauan	1 Layanan	60.457.000,00	
	44 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi udara wilayah kepulauan	1 Layanan	85.424.000,00	
	45 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi laut/sungai wilayah kepulauan	1 Layanan	69.940.000,00	
	46 Penerbitan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika luar kota transportasi udara/laut wilayah kepulauan	1 Layanan	64.172.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
060.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	1 Diklat Puz	1 Orang	24.272.000,00	
	Pendidikan Non Gelar			
	2 Pendidikan Pembentukan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSSI)	1 Orang	53.750.000,00	
	Pendidikan Non Gelar			
	3 Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama Polri	1 Orang	22.735.000,00	
	Pendidikan Tinggi			
	4 Pendidikan Tinggi Lma kepolisian (S3)	1 Orang	119.436.000,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	5 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik	1 Orang	10.000.000,00	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	6 Penyusunan Kurikulum Diklat POLRI	1 Dokumen	27.349.000,00	
	Pendidikan Non Gelar			
	7 Sekolah Staf dan Pimpinan menengah Polri	1 Orang	27.524.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
	Perkara Hukum Badan Usaha			
	1 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di DKI Jakarta	1 Perkara	98.141.000,00	
	2 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandung	1 Perkara	123.738.000,00	
	3 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tasikmalaya	1 Perkara	109.402.000,00	
	4 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Bogor	1 Perkara	109.462.000,00	
	5 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Semarang	1 Perkara	116.268.000,00	
	6 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Banyuwangi	1 Perkara	104.479.000,00	
	7 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Surakarta	1 Perkara	103.849.000,00	
	8 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Yogyakarta	1 Perkara	122.916.000,00	
	9 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Surabaya	1 Perkara	124.016.000,00	
	10 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Kediri	1 Perkara	110.877.000,00	
	11 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Jember	1 Perkara	110.877.000,00	
	12 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	1 Perkara	118.496.000,00	
	13 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Tengah	1 Perkara	106.138.000,00	
	14 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Aceh Selatan	1 Perkara	106.440.000,00	
	15 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Medan	1 Perkara	115.532.000,00	
	16 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Toba Samosir	1 Perkara	105.583.000,00	
	17 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungbalai	1 Perkara	102.612.000,00	
	18 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Padang	1 Perkara	120.091.000,00	
	19 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Pasakumbuh	1 Perkara	105.932.000,00	
	20 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Dharmasraya	1 Perkara	106.543.000,00	
	21 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pekanbaru	1 Perkara	121.792.000,00	
	22 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Dumai	1 Perkara	107.821.000,00	
	23 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Indragiri Hilir	1 Perkara	107.821.000,00	
	24 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Jambi	1 Perkara	116.198.000,00	
	25 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Sungai Penuh	1 Perkara	103.303.000,00	
	26 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palembang	1 Perkara	116.849.000,00	
	27 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Lubuklinggau	1 Perkara	104.303.000,00	
	28 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Bandar Lampung	1 Perkara	111.399.000,00	
	29 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tulang Bawang	1 Perkara	100.953.000,00	
	30 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Pontianak	1 Perkara	122.183.000,00	
	31 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sanggau	1 Perkara	107.367.000,00	
	32 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Palangka Raya	1 Perkara	119.445.000,00	
	33 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kotawaringin Barat	1 Perkara	207.716.000,00	
	34 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Banjarmasin	1 Perkara	114.160.000,00	
	35 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Perkara	102.210.000,00	
	36 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu	1 Perkara	102.210.000,00	
	37 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Samarinda	1 Perkara	161.385.000,00	
	38 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Balikpapan	1 Perkara	137.269.000,00	
	39 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tarakan	1 Perkara	137.209.000,00	
	40 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Manado	1 Perkara	117.036.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan (063)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
	41 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Sangihe	1 Perkara	104.053.000,00	
	42 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Balai POM Palu	1 Perkara	117.980.000,00	
	43 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Banggai	1 Perkara	104.592.000,00	
	44 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Makassar	1 Perkara	122.099.000,00	
	45 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Palopo	1 Perkara	107.972.000,00	
	46 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Kendari	1 Perkara	122.130.000,00	
	47 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Baubau	1 Perkara	107.932.000,00	
	48 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Ambon	1 Perkara	200.055.000,00	
	49 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	1 Perkara	155.350.000,00	
	50 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Denpasar	1 Perkara	130.755.000,00	
	51 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Puteleung	1 Perkara	115.572.000,00	
	52 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Mataram	1 Perkara	122.522.000,00	
	53 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Bima	1 Perkara	111.947.000,00	
	54 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Kupang	1 Perkara	126.179.000,00	
	55 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Ende	1 Perkara	109.644.000,00	
	56 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Manggarai Barat	1 Perkara	109.644.000,00	
	57 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Javanara	1 Perkara	219.386.000,00	
	58 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Merauke	1 Perkara	197.379.000,00	
	59 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Mimika	1 Perkara	182.022.000,00	
	60 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Bengkulu	1 Perkara	111.540.000,00	
	61 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Karang Lebong	1 Perkara	101.717.000,00	
	62 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Solik	1 Perkara	129.411.000,00	
	63 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai	1 Perkara	111.985.000,00	
	64 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Serang	1 Perkara	122.728.000,00	
	65 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kab Tangerang	1 Perkara	105.439.000,00	
	66 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Pangkal Pinang	1 Perkara	120.822.000,00	
	67 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Belitung	1 Perkara	107.252.000,00	
	68 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Gorontalo	1 Perkara	118.814.000,00	
	69 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Bidani	1 Perkara	144.918.000,00	
	70 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kota Tanjungpinang	1 Perkara	125.461.000,00	
	71 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Manokwari	1 Perkara	201.208.000,00	
	72 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	1 Perkara	173.829.000,00	
	73 Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BPOM Mamuju Pemantauan Produk	1 Perkara	113.601.000,00	
	74 Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas	1 Laporan	71.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Ketahanan Nasional (064)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
064.D1	Lembaga Ketahanan Nasional Kebijakan Bidang Politik 1 Kajian Strategis Bidang Ideologi dan Politik Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan 2 Kajian Strategis Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	1 Rekomendas. Kebijakan. 2 Rekomendas. Kebijakan.	152.480.000,00 152.480.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
065.01	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal			
	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan			
	1 Diklat Bulang, Penanaman Modal Internal dan Eksternal	1 Orang	3.734.000,00	
	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM			
	1 Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Nasional	1 UMKM	3.000.000,00	
	Pelayanan Publik kepada badan usaha			
	1 Fasilitas Berusaha terkait Masterlist	1 Badan Usaha	30.035.000,00	
	2 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah I	1 Badan Usaha	59.706.000,00	
	3 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II	1 Badan Usaha	106.667.000,00	
	4 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah III	1 Badan Usaha	62.667.000,00	
	5 Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah IV	1 Badan Usaha	64.715.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Narkotika Nasional (066)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	Badan Narkotika Nasional			
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
1	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	61.215.900,00	
2	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	23.762.975,00	
3	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Besar Rehabilitasi BNN	1 Orang	12.421.500,00	
4	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	43.173.333,00	
5	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	19.905.083,00	
6	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	1 Orang	10.424.738,00	
7	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddaka	1 Orang	41.252.000,00	
8	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddaka	1 Orang	20.278.000,00	
9	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddaka	1 Orang	12.700.791,00	
10	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	28.076.000,00	
11	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	15.801.000,00	
12	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Batam	1 Orang	8.453.500,00	
13	Program Rehabilitasi 12 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	24.046.000,00	
14	Program Rehabilitasi 6 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	12.965.303,00	
15	Program Rehabilitasi 3 Bulan Pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	1 Orang	7.924.673,00	
16	Program Rehabilitasi 6 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	18.356.500,00	
17	Program Rehabilitasi 3 Bulan Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Milik BNN di Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	1 Orang	9.333.900,00	
18	Penyidikan dan Pengujian Produk Layanan Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya	1 Produk	251.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			
	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan			
	1 Pemertanahan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Rekonstruksi	137.576.000,00	
	Koordinasi			
	2 Koordinasi Persiapan Perumahan Transmigran	1 Kegiatan	11.4.366.000,00	
	Kerja sama			
	3 Merilis Kebijakan Aritan (Arahan dan Persiapan Perumahan Transmigrasi)	1 Kesepakatan	166.356.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	4 NSPK dalam Perencanaan Persebaran Penduduk	1 NSPK	94.969.000,00	
	5 NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1 NSPK	147.374.000,00	
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	Pelatihan Bidang Sosial			
	1 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Balai	1 Orang	3.254.933,00	
	2 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.630.100,00	
	3 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Balai	1 Orang	2.501.800,00	
	4 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Yogyakarta di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.412.733,00	
	5 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Balai	1 Orang	2.791.666,00	
	6 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	3.857.500,00	
	7 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Makassar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	1.024.166,00	
	8 Kader pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Balai	1 Orang	2.927.266,00	
	9 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	1.103.333,00	
	10 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Banjarmasin di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.834.000,00	
	11 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Balai	1 Orang	3.203.200,00	
	12 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.264.000,00	
	13 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang dilatih oleh UPT Balai Pekanbaru di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	4.870.933,00	
	14 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Balai	1 Orang	3.170.733,00	
	15 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.057.666,00	
	16 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.511.666,00	
	17 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Ambon di Lokasi Jangkauan Laut	1 Orang	3.937.966,00	
	18 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	5.512.366,00	
	19 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Jayapura di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	7.907.033,00	
	20 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Balai	1 Orang	3.017.600,00	
	21 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.103.633,00	
	22 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Denpasar di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.342.666,00	
	23 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Balai	1 Orang	3.443.800,00	
	24 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Darat	1 Orang	4.065.666,00	
	25 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Bengkulu di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	4.968.133,00	
	26 Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, DTT yang Dilatih oleh UPT Balai Besar Jakarta di Lokasi Jangkauan Udara	1 Orang	5.055.533,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
068.01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional			
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	1 Pedoman di bidang tata kelola data dan informasi sistem informasi keluarga	1 NSPK	100.000.000,00	
	2 Pedoman peningkatan kualitas jejaring mitra kerja dan inovasi pemangku kebijakan dalam penguatan Program Bangsa Kencana	1 NSPK	46.854.000,00	
	3 Pedoman di bidang Pembinaan dan Penggerakan Lini Lapangan	1 NSPK	36.462.000,00	
	4 Pedoman di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan remaja	1 NSPK	76.500.000,00	
	5 Pedoman di bidang peningkatan kualitas kesehatan reproduksi	1 NSPK	110.000.000,00	
	6 Pedoman di bidang pembinaan ketahanan keluarga remaja	1 NSPK	220.000.000,00	
	7 Pedoman di bidang Ketahanan Pengendalian Penduduk	1 NSPK	200.000.000,00	
	8 Pedoman di bidang analisis dampak kependudukan	1 NSPK	50.000.000,00	
	9 Pedoman di bidang Perencanaan Pengendalian Penduduk	1 NSPK	323.000.000,00	
	10 Pedoman di bidang teknologi informasi dan data	1 NSPK	512.531.000,00	
	11 Pedoman di bidang akses pelayanan KB	1 NSPK	221.000.000,00	
	12 Pedoman di bidang pelayanan KB wilayah kotas	1 NSPK	46.150.000,00	
	13 Pedoman di bidang Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	1 NSPK	150.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (074)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
074.01	Komnas HAM Perkara Hukum Kelompok Masyarakat 1 Layanan Pengaduan Perkara Dugaan Pelanggaran HAM	1 Perkara	1.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika [075]

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	<p>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</p> <p>Sosialisasi dan Diseminasi</p> <p>1 Layanan Informasi: gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLGi) Wilayah Barat</p> <p>2 Layanan Informasi: gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLGi) Wilayah Tengah</p> <p>3 Layanan Informasi: gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLGi) Wilayah Timur</p> <p>Pelayanan Publik Lainnya</p> <p>1 Layanan Informasi: Posisi Dulan dan Matahar.</p> <p>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</p> <p>1 Layanan Informasi: meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah barat</p> <p>2 Layanan Informasi: meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah Tengah</p> <p>3 Layanan Informasi: meteorologi maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) wilayah Timur</p>	<p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p> <p>1 Orang</p>	<p>933.386,00</p> <p>939.500,00</p> <p>1.184.218,00</p> <p>372.719.000,00</p> <p>1.336.220,00</p> <p>1.351.430,00</p> <p>1.378.150,00</p>	

Kementerian Negara/Lembaga: Mahkamah Konstitusi (077)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
077.01	Mahkamah Konstitusi RI Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat 1. Simbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi Full Funded (1 kegiatan, max 150 peserta) 2. Simbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi Cost Sharing (1 kegiatan, max 150 peserta)	1 Orang 1 Orang	5.504.580,00 2.034.873,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (078)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
078.01	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan 1 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pihak Pelapor	1 Orang	1.536.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Informasi Geospasial (BIG) (083)

[dalam rupiah]

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
083.01	Badan Informasi Geospasial (BIG) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 1 Kurikulum Persejangan OF Surveyor Pemetaan Data dan Informasi Publik 2 Informasi Geospasial Berkualitas Siap Publikasi	: NSPK : Data Publikasi	195.206.000,00 1711.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BPTN)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 1 Standar Prosedur Kedaruratan Nuklir Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir 2 Penyusunan dan Penyempurnaan Rancangan Laporan Evaluasi draf Publikasi IAEA	1 Pedoman 1 Rekomendasi Kebijakan	100.000.000,00 25.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (087)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
087.01	Arsip Nasional Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1 Rekomendasi kebijakan bidang kearsipan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 2 Lembaga Pemerintah yang Dibina untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Lembaga	217.478.000,00 5.469.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Kepegawaian Negara (OSS)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
OSS.01	Badan Kepegawaian Negara			
	Peningkatan kapasitas Aparatur Negara			
1	Perubahan Data Kepegawaian	1 Orang	11.901.761,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
2	Standar Jabatan Fungsional Kepegawaian	1 NSPK	56.250.000,00	
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			
3	NSPK Seleksi Berbasis CAT	1 NSPK	178.819.000,00	
	Akreditasi Lembaga			
4	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Penilaian Potensi dan Kompetensi	1 Lembaga	41.700.000,00	
	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
5	Facilitasi Penilaian Potensi dan Kompetensi	1 Orang	3.660.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan			
	Pengawasan Pembangunan			
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	414.813.000,00	
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah	1 Laporan	414.813.000,00	
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	414.813.000,00	
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelayaan Negara/Daerah yang dipisahkan dan BCU/BLUD	1 Laporan	414.813.000,00	
5	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1 Laporan	269.716.000,00	
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Laporan	414.813.000,00	
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembiayaan Pilkada	1 Laporan	414.813.000,00	
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	1 Laporan	414.813.000,00	
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Program Ekonomi Hijau	1 Laporan	414.813.000,00	
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah	1 Laporan	414.813.000,00	
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	414.813.000,00	
12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	414.813.000,00	
13	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	414.813.000,00	
14	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	414.813.000,00	
15	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	414.813.000,00	
16	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	414.813.000,00	
17	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	414.813.000,00	
18	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	1 Laporan	619.519.000,00	
19	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Keurangan	1 Laporan	429.372.000,00	
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	229.712.000,00	
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	229.712.000,00	
22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
25	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
28	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
29	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
30	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
31	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
32	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kelengkapan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
33	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
34	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
35	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
36	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
37	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
38	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
39	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
40	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
42	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
43	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
44	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
45	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
46	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
47	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
48	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
49	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pengukuran Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
50	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
51	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
52	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
53	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
54	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
55	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
56	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
57	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
58	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pengukuran Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
59	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
60	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
61	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
62	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
63	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
64	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
65	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
66	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1 Laporan	590.384.000,00	
67	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
68	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
69	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
70	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pengukuran Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
71	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
72	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
73	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
74	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
75	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
76	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
77	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
78	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1 Laporan	590.384.000,00	
79	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
80	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pengukuran Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
81	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
82	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
83	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
84	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
85	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
86	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
87	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
88	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pemuda dan Keluarga	1 Laporan	1.173.803.000,00	
89	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
90	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pengukuran Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
91	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
92	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
93	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
94	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
95	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
96	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
97	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
98	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
99	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
100	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
101	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
102	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
103	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
104	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
105	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
106	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
107	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
108	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Pemenuhan Negara/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
109	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
110	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
111	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
112	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
113	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
114	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
115	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
116	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
117	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
118	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
119	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
120	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
121	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
122	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
123	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
124	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
125	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
126	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
127	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
128	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
129	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
130	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
131	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
132	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
133	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
134	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
135	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
136	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
137	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
138	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
139	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
140	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
141	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pendidikan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
142	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
143	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
144	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
145	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
146	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
147	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
148	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
149	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
150	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
151	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
152	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
153	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
154	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Kemiskinan Ekstrem dan Pencegahan Stunting	1 Laporan	1.173.803.000,00	
155	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
156	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
157	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
158	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
159	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
160	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
161	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
162	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1 Laporan	390.384.000,00	
163	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Prioritas Nasional dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
164	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
165	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
166	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
167	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
168	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
169	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
170	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
171	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	
172	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.013.087.000,00	
173	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
174	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.173.803.000,00	
175	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Program Ekonomi Hijau	1 Laporan	1.173.803.000,00	
176	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
177	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
178	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
179	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
180	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
181	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
182	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.013.087.000,00	
183	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
184	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah Yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.173.803.000,00	
185	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Peningkatan Kualitas Pengendalian	1 Laporan	1.173.803.000,00	
186	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
187	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
188	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
189	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
190	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
191	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
192	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern K/L	1 Laporan	1.013.087.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Resorvan	Keterangan
1	2	3	4	5
193	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.013.087.000,00	
194	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
195	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.173.803.000,00	
196	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1 Laporan	590.384.000,00	
197	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
198	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
199	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
200	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
201	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
202	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
203	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.013.087.000,00	
204	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
205	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
206	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.173.803.000,00	
207	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Program Ekonomi Hijau	1 Laporan	1.173.803.000,00	
208	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
209	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
210	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
211	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
212	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
213	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
214	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.013.087.000,00	
215	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
216	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	1 Laporan	1.173.803.000,00	
217	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Reformasi Pembangunan SDM	1 Laporan	1.173.803.000,00	
218	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
219	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pemulihan Ekonomi	1 Laporan	1.173.803.000,00	
220	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1 Laporan	1.173.803.000,00	
221	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Kemiskinan Ekstrem	1 Laporan	1.173.803.000,00	
222	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Nasional Lainnya	1 Laporan	1.173.803.000,00	
223	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	1 Laporan	1.013.087.000,00	
224	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
225	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
226	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
227	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Keuangan	1 Laporan	628.036.000,00	
228	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
229	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
230	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
231	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Keuangan	1 Laporan	628.036.000,00	
232	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
233	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
234	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	
235	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Keuangan	1 Laporan	628.036.000,00	
236	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
237	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Optimalisasi Pemerintahan Negara/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
238	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
239	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1 Laporan	590.384.000,00	
240	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengembangan Wilayah	1 Laporan	1.173.803.000,00	
241	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	1 Laporan	1.173.803.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
242	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendali Keurusan	1 Laporan	628.036.000,00	
243	Hasil Pengawasan Internal BPKP	1 Dokumen	60.000.000,00	
244	Hasil Koordinasi tindak lanjut temuan Hasil Pengawasan Internal	1 Dokumen	100.000.000,00	
245	Hasil Evaluasi SAKIP BPKP	1 Dokumen	25.000.000,00	
246	Hasil Evaluasi Maturitas SPII BPKP	1 Dokumen	25.000.000,00	
247	Diklat Fungsional Auditor PNB	1 Orang	10.000.000,00	
248	Diklat Fungsional Auditor STAR	1 Orang	20.125.000,00	
249	Diklat Teknis Substansi PNB	1 Orang	10.000.000,00	
250	Diklat Teknis Substansi STAR	1 Orang	20.000.000,00	
251	Diklat Sertifikasi Non JFA PNB	1 Orang	10.000.000,00	
252	Diklat Sertifikasi Non JFA STAR	1 Orang	30.000.000,00	
253	Pelatihan Darat Massal (MOC) PNB	1 Orang	300.000,00	
254	Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi PNB	1 Orang	2.500.000,00	
255	Hasil Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Pengawasan	1 Laporan	200.000.000,00	
256	Hasil Pembuatan Analisis Kinerja Pengawasan	1 Laporan	350.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Perdagangan (090)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Sertifikasi Profesi dan SDM 1 Sertifikasi <i>Person</i> Sertifikasi Produk 2 Sertifikasi Produk Tipe 5 Dalam Negeri 3 Sertifikasi Produk Tipe 5 Luar Negeri 4 Sertifikasi Produk Tipe 1 Dalam Negeri 5 Sertifikasi Produk Tipe 1 Luar Negeri	1 Orang 1 Produk 1 Produk 1 Produk 1 Produk	685.000,00 10.367.000,00 20.855.000,00 1.820.000,00 3.808.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Pemuda dan Olah Raga (092)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 1 Pengelola industri olahraga yang terfasilitasi dalam Pelatihan SDM Industri dan Promosi Olahraga	1 Orang	6.541.196,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pemberantasan Korupsi (093)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
093.01	Komis Pemberantasan Korupsi Sertifikasi Profesi dan SDM 1 Sertifikasi Profesi dan Kompetensi Antikorupsi 2 Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 3 Pemeriksaan LHKPN	1 Orang 1 Orang 1 Orang	1.438.200,00 1.438.200,00 6.625,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Dewan Perwakilan Daerah (095)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
095.02	Dewan Undang-Undang 1 Perimbangan DPD RI atas Calon Anggota DPR	1 UU	168.350.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Yudisial RI (100)

Id dalam rupiah

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	Komisi Yudisial RI			
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat			
	1. Investigasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik	1 Laporan	85.400.000.00	
	2. Investigasi Pembilangan Kasus	1 Laporan	189.170.000.00	
	3. Penelusuran rekam jejak hakim dan CHA	1 Orang	73.414.000.00	
	4. Investigasi Pencegahan Pelanggaran Disiplin dan Etik	1 Laporan	385.183.000.00	
	5. Investigasi Awal di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung	1 Laporan	5.880.000.00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (103)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana			
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	1 NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Fisik	1 NSPK	400.000.000,00	
	2 NSPK Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 NSPK	400.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	3 Pendampingan Petugas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Orang	8.000.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	4 NSPK Bidang Dukungan Sumber daya Darurat	1 NSPK	400.000.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	5 NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana	1 NSPK	400.000.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	6 NSPK Bidang Kehendanaan	1 NSPK	400.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	7 Pendampingan Pengelolaan Infrastruktur Darurat	1 Orang	8.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	8 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	1 Orang	8.000.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	9 Pendampingan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana dan Kesiapsiagaan	1 NSPK	8.000.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	10 NSPK Bidang Optimalisasi Jaringan Logistik dan Perantara	1 NSPK	400.000.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	11 NSPK Bidang Pendidikan dan Pelatihan PB	1 NSPK	400.000.000,00	
	Koordinasi			
	12 Penggantian Sistem Peringatan Dini	1 Kegiatan	300.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (104)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
104.01	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia			
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	1 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan Asia dan Afrika	1 NSPK	44.162.500,00	
	Koordinasi			
	2 Koordinasi teknis peningkatan Penempatan Pemerintah di Kawasan Asia dan Afrika	1 Kegiatan	177.128.000,00	
	3 Koordinasi teknis peningkatan penempatan Non Pemerintah di Kawasan Asia dan Afrika	1 Kegiatan	81.774.000,00	
	4 Koordinasi Teknis Pemberdayaan Putra PMI dan Keluarga di Kawasan Asia dan Afrika	1 Kegiatan	39.675.000,00	
	5 Koordinasi Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan Asia dan Afrika	1 Kegiatan	75.900.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	6 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan Amerika dan Pasifik	1 NSPK	65.418.000,00	
	Koordinasi			
	7 Koordinasi teknis peningkatan penempatan PMI di Kawasan Amerika dan Pasifik	1 Kegiatan	210.600.000,00	
	8 Koordinasi Teknis Pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kawasan Amerika dan Pasifik	1 Kegiatan	259.660.000,00	
	9 Koordinasi Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan Amerika dan Pasifik	1 Kegiatan	48.960.000,00	
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria			
	10 NSPK bidang penempatan dan pelindungan PMI Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 NSPK	61.563.000,00	
	Koordinasi			
	11 Koordinasi teknis peningkatan Penempatan Pemerintah di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Kegiatan	121.130.000,00	
	12 Koordinasi teknis peningkatan penempatan Non Pemerintah di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Kegiatan	94.559.000,00	
	13 Koordinasi Teknis Pemberdayaan ekonomi dan sosial di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Kegiatan	29.435.000,00	
	14 Koordinasi Teknis Penanganan PMI Terkendala di Kawasan Eropa dan Timur Tengah	1 Kegiatan	32.960.000,00	
	15 Koordinasi penguatan layanan penempatan dan pelindungan PMI terhadap Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1.546.380.000,00	
	16 Koordinasi penguatan layanan penempatan dan pelindungan PMI terhadap Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	565.402.000,00	
	17 Koordinasi penguatan layanan penempatan dan pelindungan PMI terhadap Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	470.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 1 Pedoman Sertifikasi PEKIP Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 2 Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan Clearing House	1 Pedoman 1 K/L	133.240.000,00 25.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) (107)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
107.01	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)			
	Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana			
	1 Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara	1 Orang	5.235.000,00	
	Koordinasi			
	2 Latihan SAR Berregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	62.358.000,00	
	3 Latihan SAR Berregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	65.131.000,00	
	4 Latihan SAR Berregu di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	72.133.000,00	
	5 Latihan SAR Berregu di Ketinggian untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	14.447.000,00	
	6 Latihan SAR Berregu di Ketinggian untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	14.592.000,00	
	7 Latihan SAR Berregu di Ketinggian untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	18.523.000,00	
	8 Latihan SAR Berregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	36.335.000,00	
	9 Latihan SAR Berregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	37.021.000,00	
	10 Latihan SAR Berregu di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	43.838.000,00	
	11 Latihan SAR Berregu di Permukaan Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	30.916.000,00	
	12 Latihan SAR Berregu di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	33.724.000,00	
	13 Latihan SAR Berregu di Permukaan Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	40.725.000,00	
	14 Latihan SAR Berregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	34.796.000,00	
	15 Latihan SAR Berregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	37.153.000,00	
	16 Latihan SAR Berregu pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	41.840.000,00	
	17 Latihan SAR Berregu di Bawah Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	61.027.000,00	
	18 Latihan SAR Berregu di Bawah Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	62.813.000,00	
	19 Latihan SAR Berregu di Bawah Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	69.797.000,00	
	20 Latihan SAR Berregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	41.416.000,00	
	21 Latihan SAR Berregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	45.985.000,00	
	22 Latihan SAR Berregu di Ruang Terbatas untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	51.806.000,00	
	23 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	69.054.000,00	
	24 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	72.036.000,00	
	25 Latihan SAR Satuan di Bangunan Runtuh untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	78.443.000,00	
	26 Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	18.434.000,00	
	27 Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	18.876.000,00	
	28 Latihan SAR Satuan di Ketinggian untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	24.424.000,00	
	29 Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	47.040.000,00	
	30 Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	49.130.000,00	
	31 Latihan SAR Satuan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	57.240.000,00	
	32 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	34.658.000,00	
	33 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	35.313.000,00	
	34 Latihan SAR Satuan di Permukaan Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	41.715.000,00	
	35 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	41.645.000,00	
	36 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	44.151.000,00	
	37 Latihan SAR Satuan pada Kecelakaan Kendaraan Bermotor untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	50.711.000,00	
	38 Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	69.052.000,00	
	39 Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	71.219.000,00	
	40 Latihan SAR Satuan di Bawah Air untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	78.921.000,00	

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
41	Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Barat	1 Kegiatan	55.000.000,00	
42	Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Tengah	1 Kegiatan	57.500.000,00	
43	Latihan SAR Satuan di Ruang Terbatas untuk Wilayah Timur	1 Kegiatan	65.300.000,00	
Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat				
44	Siaga SAR Khusus Lebanon di Kantor SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	99.130.000,00	
45	Siaga SAR Khusus Lebanon di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	100.924.000,00	
46	Siaga SAR Khusus Lebanon di Kantor SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	106.065.000,00	
47	Siaga SAR Khusus Lebanon di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	33.358.000,00	
48	Siaga SAR Khusus Lebanon di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	37.092.000,00	
49	Siaga SAR Khusus Lebanon di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	38.190.000,00	
50	Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	69.850.000,00	
51	Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	71.488.000,00	
52	Siaga SAR Khusus Nataru di Kantor SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	74.775.000,00	
53	Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Barat	1 Laporan	27.748.000,00	
54	Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Tengah	1 Laporan	29.027.000,00	
55	Siaga SAR Khusus Nataru di Pos/ Unit Siaga SAR untuk Wilayah Timur	1 Laporan	29.836.000,00	
Pelatihan Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana				
56	Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Rescuer	1 Orang	37.560.000,00	
57	Diklat Dasar SAR untuk Jabatan Non Rescuer	1 Orang	28.241.000,00	
58	Diklat Perencanaan Operasi SAR	1 Orang	18.886.000,00	
59	Diklat SAR di Permukaan Air	1 Orang	26.500.000,00	
60	Diklat SAR di Bangunan Runtuh	1 Orang	22.477.000,00	
61	Diklat Teknis Komunikasi SAR	1 Orang	17.777.000,00	
62	Diklat Medikal First Responder	1 Orang	19.273.000,00	
Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat				
63	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.000.000,00	
64	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.500.000,00	
65	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.720.000,00	
66	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.760.000,00	
67	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.120.000,00	
68	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.240.000,00	
69	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.160.000,00	
70	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.360.000,00	
71	Pelatihan Teknis Potensi SAR di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.640.000,00	
72	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	5.800.000,00	
73	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	6.240.000,00	
74	Pelatihan Teknis Potensi SAR Medical First Responder untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	1 Orang	7.400.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (108)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
108.01	Komisi Pengawas Persaingan Usaha Layanan Manajemen Kinerja Internal 1. Layanan Non Audit Internal	1 Laporan	399.462.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Ombudsman Republik Indonesia (110)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
110.01	Ombudsman Republik Indonesia			
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			
	1 Penyelesaian Aduan terkait Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI	1 Orang	3.830.900,00	
	2 Penjaminan Mutu Penyelesaian Laporan Masyarakat	1 Dokumen	42.897.235,00	
	3 Penjaminan Mutu Pencegahan Maladministrasi	1 Dokumen	48.186.142,00	
	Pelayanan Publik Lainnya			
	4 Akses Pengaduan Pelayanan Publik	1 Layanan	60.000.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah			
	5 Survei Indeks Persepsi Maladministrasi	1 Pemerintah Daerah	20.000.000,00	
	6 Opini Pengawasan Pelayanan Publik	1 Pemerintah Daerah	616.000,00	
	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik			
	7 Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	1 Rekomendasi Kebijakan	75.610.000,00	
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			
	8 Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Pusat	1 Unit kerja	27.000.000,00	
	9 Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	1 Unit kerja	20.000.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
	10 Penyelenggara Pelayanan Publik bagi Kelompok Marginal dan bagi Masyarakat di Daerah Tertinggal, Terdepan, Tertinggal (3T) yang Dilakukan Pendampingan	1 Lembaga	441.250.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Pengelola Perbatasan (111)

idalam rupiah:

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
111.01	Badan Nasional Pengelola Perbatasan			
	Koordinasi			
	1 Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Darat	1 Kegiatan	418.200.000,00	
	2 Identifikasi Pilar Batas Negara Wilayah Laut dan Udara	1 Kegiatan	375.180.000,00	
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			
	3 Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Perena Kawasan Perbatasan Darat	1 Orang	10.824.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	4 Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penataan Ruang Kawasan Perbatasan	1 Orang	10.772.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			
	5 Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara	1 Orang	7.500.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (112)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
112.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam) Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 1 Strategi Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko Unit Usaha Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 2 Rumusan Strategi Restrukturisasi dan Budaya Unit Usaha Pelayanan Publik Lainnya 3 Penyelenggaraan Vertikal Teknis Perizinan OSS dan Perizinan Lainnya	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Rekomendasi Kebijakan 1 Layanan	3.100.151.000,00 623.849.000,00 345.130.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Nasional Penanggulangan Teroris (113)

[dalam rupiah]

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
113.01	Badan Nasional Penanggulangan Teroris Operasi Bidang Keamanan			
	1 Asesmen Sistem Pengamanan Terhadap Objek Vital Strategis dan Sistem Transportasi dari Tindak Pidana Terorisme	1 Operasi	1.653.482.000,00	
	2 Asesmen Sistem Pengamanan Terhadap Fasilitas Publik dari Tindak Pidana Terorisme	1 Operasi	1.089.040.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Sekretariat Kabinet (114)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
114.01	Sekretariat Kabinet Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 1 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerimaan Kearsipan 2 Naskah kepresidenan Kebijakan Bidang Aparatur 3 Rekomendasi pembinaan Pejabat Fungsional Penerimaan (PFP) Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan 4 Rekomendasi kebijakan di bidang Perencanaan Modal dan Kepariwisata Peridangan Lembaga Eksekutif 5 Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratus/pertemuan lainnya	1 Orang 1 Dokumen, Arsip 1 Rekomendasi kebijakan, Kajian 1 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 1 Sesi	2.873.200,00 4.562.500,00 766.705.000,00 93.561.000,00 766.667.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia (116)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
116.01	Lembaga Penyiaran Publik - Radio Republik Indonesia			
	Data dan Informasi Publik			
	1 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	4.098.000,00	
	2 Program Huletin Berita	1 Layanan	911.000,00	
	3 Program <i>Feature</i>	1 Layanan	774.000,00	
	4 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	1.946.000,00	
	5 Program Produksi Komentar	1 Layanan	524.000,00	
	6 Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.704.000,00	
	7 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Layanan	382.000,00	
	8 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	601.000,00	
	Data dan Informasi Publik			
	9 Program Siaran Dialog Interaktif di Dalam Studio	1 Layanan	1.291.000,00	
	10 Program Siaran Dialog Interaktif di Luar Studio	1 Layanan	5.218.000,00	
	11 Program Produksi SPOT	1 Layanan	206.000,00	
	12 Program Produksi Buletin Berita	1 Layanan	930.000,00	
	13 Program Siaran Produksi <i>Feature</i>	1 Layanan	712.000,00	
	14 Program Produksi Laporan Menulalam	1 Layanan	1.060.000,00	
	15 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	2.026.000,00	
	16 Program Produksi Majalah Lidara	1 Layanan	992.000,00	
	17 Program Siaran Kus	1 Layanan	432.000,00	
	18 Program Produksi Sandiwara Radio	1 Layanan	1.939.000,00	
	19 Program Siaran Pergelaran	1 Layanan	15.480.000,00	
	20 Program Produksi Komentar	1 Layanan	487.000,00	
	21 Program Produksi Dokumenter	1 Layanan	1.539.000,00	
	22 Program Produksi Kaleidoskop	1 Layanan	1.643.000,00	
	23 Program Siaran Obrolan	1 Layanan	497.000,00	
	24 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Layanan	351.000,00	
	25 Program Produksi <i>Report On The Spot (ROS)</i>	1 Layanan	86.000,00	
	26 Program Siaran Pendekatan <i>Development Broadcasting Unit (DBU)</i>	1 Layanan	3.203.000,00	
	27 Program Siaran Wawancara	1 Layanan	622.000,00	
	Data dan Informasi Publik			
	28 Program Produksi SPOT	1 Layanan	544.000,00	
	29 Program Siaran Langsung Reportase	1 Layanan	2.021.000,00	
	30 Program Produksi Komentar	1 Layanan	996.000,00	
	31 Program Produksi <i>Filler</i>	1 Layanan	355.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Televisi Republik Indonesia (117)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
117.01	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pelayanan Publik Lainnya 1 Konten Media Baru	Layanan	9.000.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (118)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
118.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKEB Sabang) Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 1 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Penilaian Lingkungan Hidup Sarana Pengembangan Kawasan 2 Operasional Marina Lhoè Weug Sarana Pengembangan Kawasan 3 Operasional Museum BPKEB	1 Rekomendasi Kebijakan 1 Ura 1 Ura	60.000.000,00 17.200.000,00 15.000.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Badan Keamanan Laut (119)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
119.01	Badan Keamanan Laut			
	Operasi Bidang Keamanan			
	1 Operasi Udara Maritim	1 Operasi	5.838.526.000,00	
	Operasi Bidang Keamanan			
	2 Patroli Mandiri	1 Hari Operasi	4.069.161.000,00	
	Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan			
	3 Maritime Security Desktop Exercise	1 Orang	8.419.000,00	
	4 CBP IACCAM	1 Orang	10.364.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (120)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
120.01	Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim			
	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			
	1 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1 Rekomendasi Kebijakan	733.333.000,00	
	2 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Perikanan Budidaya	1 Rekomendasi Kebijakan	606.666.000,00	

Kementerian Negara/Lembaga: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Volume dan Satuan Ukur	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5
123.01	Sekretariat Jenderal			
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			
	1 Layanan Penerimaan dan Penelaahan Permohonan Saksi dan Korban	1 Orang	34.885.000,00	
	2 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme	1 Orang	59.770.000,00	
	3 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	1 Orang	57.632.000,00	
	4 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana HAM Berat	1 Orang	59.644.000,00	
	5 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana TPPPO	1 Orang	58.720.000,00	
	6 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana penyiksaan	1 Orang	58.720.000,00	
	7 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana umum lainnya	1 Orang	57.190.000,00	
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			
	8 Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1 Orang	57.790.000,00	
	Kerja sama			
	9 Kerja sama	1 Dokumen	197.745.000,00	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	10 Penyusunan Keputusan LPSK dan Keputusan Sekjen	1 Layanan	99.380.000,00	
	11 Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK	1 Layanan	96.790.000,00	
	Pelayanan Publik kepada Masyarakat			
	12 Layanan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK	1 Orang	60.457.000,00	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

